



SEKERETARIAT DPRD
KABUPATEH MAGELANG



PERUBAHAN **RENSTRA** RENCANA STRATEGIS

2019 - 2024



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/ 167 /KEP/02/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

BUPATI MAGELANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	SEKRETARIS DPRD	Pt. KABAG PEMERINTAHAN	Pt. KABAG HUKUM

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 28);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 65);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 26);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan data dan informasi;
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana perangkat daerah; dan
 - c. melaporkan penyelenggaraan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kegiatan kepada Bupati.
- KETIGA** : Uraian tugas/tanggung jawab setiap kedudukan dalam Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KELIMA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 3 Juni 2021

BUPATI MAGELANG,


ZAENAL ARIFIN

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	SEKRETARIS DPRD	Plt. KABAG PEMERINTAHAN	Plt. KABAG HUKUM
			

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR: 180.182/ 167 /KEP/02/2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
 SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Drs. ARI HANDOKO, M.M.	Sekretaris DPRD	Ketua	Apabila terjadi mutasi pejabat/staf, maka penggantinya secara langsung menggantikan kedudukan dalam Tim dimaksud.
2.	SRI MURNI EDIYATI, S.H.	Kabag Persidangan dan Rapat Risalah	Wakil Ketua I	
3.	ARI KUSWARDANI, S.H.	Kabag Umum	Wakil Ketua II	
4.	ISWIYATI, S.H., M.H.	Kabag Keuangan	Wakil Ketua III	
5.	SRI REJEKI DYAH EKOWATI, S.E.	Kasubbag Program	Sekretaris	
6.	FATACH YASIN, S.H.	Kasubbag Perundang-undangan	Penanggung Jawab Teknis	
7.	SRI SUMARNI, S.E.	Kasubbag Umum, Kepegawaian, Humas dan Protokol	Anggota	
8.	MAMI SUBELO, S.H.	Kasubbag Persidangan	Anggota	
9.	KASTOLANI, S.Sos.	Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan	Anggota	
10.	INDARI, S.E.	Kasubbag Keuangan	Anggota	
11.	ANA LISTYAWATI, S.H.	JFU pada Sekretariat DPRD	Anggota	

BUPATI MAGELANG,


 ZAENAL ARIFFIN

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	SEKRETARIS DPRD	Plt. KABAG PEMERINTAHAN	Plt. KABAG HUKUM
			

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
 NOMOR:180.182/167 /KEP/02/2021
 TENTANG
 TIM PENYUSUN PERUBAHAN
 RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 DAERAH KABUPATEN MAGELANG
 TAHUN 2019 - 2024

URAIAN TUGAS/TANGGUNG JAWAB TIM PENYUSUN PERUBAHAN
 RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019-2024

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Ketua	Bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024
2.	Wakil Ketua	Membantu tugas Ketua dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024
3.	Sekretaris	Membantu tugas administrasi Ketua Tim dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
4.	Penanggung Jawab Teknis	Bertanggung jawab secara teknis penyusunan program dan kegiatan pada Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024
5.	Anggota	Membantu melaksanakan tugas operasional sesuai bidang/kompetensinya dalam pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

BUPATI MAGELANG,



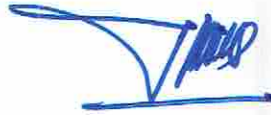
ZAENAL ARIFIN

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	SEKRETARIS DPRD	Pt. KABAG PEMERINTAHAN	Pt. KABAG HUKUM

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Perubahan Renstra PD Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 akan saya laksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 20019-2024.

Kota Mungkid, 27 Oktober 2021
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN MAGELANG



Drs. ARI HANDOKO, MM
NIP. 197307061993031003

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Taufik dan Hidayah-Nya, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magelang dapat diselesaikan.

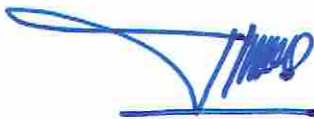
Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 disusun berpedoman pada arah kebijakan dan target program prioritas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang selanjutnya dituangkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) untuk setiap tahunnya

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magelang untuk memberikan kontribusi secara signifikan bagi keberhasilan pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Magelang. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen dalam pelaksanaan dan evaluasi secara berkala terhadap muatan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi, melalui Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana yang telah dilakukan ini.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 ini belum sepenuhnya sempurna sesuai dengan yang diharapkan. Untuk itu, mohon kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan di kemudian hari.

Kota Mungkid, 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG



Drs. ARI HANDOKO, MM
NIP. 197307061993031003

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAGELANG	7
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat	
2.1 Daerah	7
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	13
2.3 Sarana dan Prasarana pada Sekretariat DPRD	18
2.4 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	20
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	
2.5 Perangkat Daerah	26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGI PERANGKAT DAERAH	29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	29
3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	31
3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	35
3.4 Telaah Tata Ruang Wilayah dan KLHS pada RPJMD	38
3.5 Penentuan Isu-isu Strategi	39
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	41
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat	
4.1 Daerah	41
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	44
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	45
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49
BAB VIII PENUTUP	76
8.1 Kaidah Pelaksanaan	76
8.2 Kaidah Pembiayaan	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	2.1	Struktur Organisasi Sekretariat DPRD	13
Gambar	2.2	Diagram Karyawan Sekretariat DPRD Berdasarkan Golongan/Pangkat	17

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	SDM Sekretariat DPRD berdasarkan kelompok Jabatan	14
Tabel	2.2	Jenjang Pendidikan SDM	16
Tabel	2.3	Jumlah ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Berdasarkan Gol/Pangkat	16
Tabel	2.4	Pendidikan Jabatan Struktur Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	17
Tabel	2.5	Sarana dan Prasarana pada Sekretariat DPRD	18
Tabel	2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan	21
Tabel	2.7	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	22
Tabel	2.8	Komparasi Capaian Sasaran Renstra terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra Kementerian/Kelembagaan	28
Tabel	3.1	Indikator dan Permasalahan Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD	31
Tabel	3.2	Telaah visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati	34
Tabel	3.3	Telaah Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	36
Tabel	4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	43
Tabel	5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	44
Tabel	6.1	Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024	49
Tabel	7.1	Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Tahun 2019 - 2024	50
Tabel	7.2	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Tujuan dan Sasaran RJMD	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilakukan oleh semua komponen bangsa dalam mencapai tujuan bernegara. Untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien dan ber sasaran dalam rangka pencapaian tujuan negara maka diperlukan suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan turunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Namun berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 342 ayat (1) huruf (c) dijelaskan bahwa perlu dilakukan Perubahan RPJMD, dan pasal 342 ayat (3) menjelaskan bahwa perubahan yang mendasar dimaksud adalah mencakup terjadinya bencana alam, krisis ekonomi dan perubahan kebijakan nasional.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) yang menyatakan bahwa Renstra-PD memuat visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan Pembangunan yang disusub sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Dan berdasarkan PP nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perlu dilakukan penyesuaian struktur Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Merujuk dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah maka perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah daerah bersama **stakeholder** berdasar keterkaitan dan kewenangannya, serta berdasar kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dengan dinamika pembangunan. Perencanaan Daerah tidak lepas dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengamanatkan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun

Rencana Strategis (Renstra) yang dikoordinasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Renja-PD juga disusun dengan berpedoman kepada Renstra PD dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Kabupaten maupun yang ditempuh dengan mending partisipasi masyarakat.

Dokumen Rencana Strategis ini dibuat sebagai pedoman bagi aparatur di Lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagai arah kebijakan dalam melaksanakan aktivitas kegiatan serta untuk keseragaman ola berfikir dan bertindak dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sehubungan dengan telah disusunnya perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024, maka Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ditindaklanjuti dengan menyusun perubahan Renstra Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 20019-2024 sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Magelang untuk 3 tahun kedepan yang juga berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2019 – 2024 tersebut, dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten 2019-2024 mengalami perubahan dikarenakan adanya perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 diakibatkan oleh tuntutan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan yang sangat dinamis disertai adanya wabah pandemic COVID-19 (Corona Virus Desease 2019). Selain itu perubahan kebijakan pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Perubahan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daeah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap RPJMD Kabupaten Magelang 2019-2024.

Mengacu pada hal tersebut diatas maka disusun perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan penyusunan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Rencana Strategis PD Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanakan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136).
10. Peraturan Presiden Nomer 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan

Purworejo-Wonosobo-Magelang—Temanggung dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang.

11. Peraturan Presiden Nomer 109 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 (lembaran daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 5)
17. Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang adalah sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu tahun 2019-2024 yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

1.3.2 Tujuan

Sedangkan tujuannya adalah untuk mengarahkan semua unsur kekuatan dan faktor kunci keberhasilan dalam rangka menentukan strategi yang tepat bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024 dalam memberikan pelayanan dan dukungan kepada Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang serta kepada masyarakat antara lain sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran, informasi sasaran strategis, permasalahan dan kondisi capaian pelayanan serta mendukung kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD;
2. Menetapkan program dan kegiatan/sub kegiatan yang terukur sesuai pedoman tahapan dalam menyusun rencana kerja tahunan;
3. Memberikan acuan dalam monitoring, pengendalian dan evaluasi serta kebijakan strategis target capaian yang menjadi landasan penyusunan program kegiatan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magelang selama 3 tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Perubahan Rencana Strategis PD Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika.

BAB II Gambaran Pelayanan PD Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

Bab ini memuat tugas, fungsi yang didalamnya memuat struktur organisasi, susunan kepegawaian, yang terkait dengan kewenangan urusan bidang pemerintahan, kondisi capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.

BAB III Isu-isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Bab ini memuat permasalahan pokok berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, RT/RW dan Kajian Lingkungan Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Bab ini memuat berbagai konsensus dan komitmen mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi kebijakan bidang pemerintahan dan pelayanan yang diarahkan untuk dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

BAB V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator, Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Bab ini memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, disamping itu juga memuat tentang indikator kinerja kelompok sasaran serta pendanaan indikatif untuk lima tahun kedepan 20019-2024.

BAB VI Indikator Kinerja OPD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Bab ini memuat indikator kinerja yang ditetapkan serta menjadi alat ukur kinerja dalam pencapaian visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.

BAB VII Penutup

Bab ini memuat tentang penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan serta berlaku sebagai pedoman standar kinerja pelaksanaan program serta kegiatan 5 (lima) tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN OPD
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAGELANG

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Magelang. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Magelang yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Magelang.

Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ialah membantu Bupati menyelenggarakan administrasi dan kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Magelang serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten Magelang dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan. Sebagaimana di amanatkan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Sekretariat DPRD.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang mempunyai :

2.1.1. Tugas

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

2.1.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magelang melaksanakan fungsi, antara lain :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;

- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
- c. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas kesekretariatan DPRD dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang. Hal ini memperlihatkan bahwa adanya pembagian tugas yang dilaksanakan secara menyeluruh sebagai berikut :

- a. Sekretaris Dewan;

Sekretariat DPRD merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan Pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan Pimpinan Fraksi.

b. Bagian Umum

Bagian Umum mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi kesekretariatan DPRD.

Bagian Umum dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

1. Penatausahaan Sekretariat DPRD;
2. Pengelolaan kepegawaian Sekretariat DPRD;
3. Pengelolaan Administrasi keanggotaan DPRD;
4. Fasilitasi pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota DPRD;
5. Pengelolaan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan DPRD;
6. Penyediaan fasilitasi fraksi DPRD;
7. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga DPRD;
8. Penyelenggaraan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana DPRD;
9. Penyelenggaraan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab DPRD; dan
10. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Umum membawahi Sub Bagian Tata usaha dan Kepegawaian; Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

c. Bagian Program dan Keuangan

Bagian Program dan Keuangan dalam tugasnya mempunyai fungsi:

1. Penyusunan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD
2. Evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD
3. Verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat DPRD
4. Verifikasi Kebutuhan perlengkapan sekretariat DPRD
5. Penatausahaan keuangan Sekretariat DPRD
6. Mengoordinasikan pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD;
7. Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD
8. Pengelolaan keuangan pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD
9. Verifikasi pertanggungjawaban keuangan Sekretariat DPRD
10. Evaluasi laporan keuangan sekretariat DPRD
11. Evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD
12. Penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD
13. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Program dan Keuangan membawahi Subbagian Perencanaan dan Penganggaran dan Subbagian Verifikasi, Akuntansi dan Pelaporan

d. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas dukungan legislasi.

Bagian persidangan dan perundang-undangan dalam melaksanakan fungsi :

- a. penyelenggaraan kajian perundang-undangan;
- b. fasilitasi penyusunan program pembentukan peraturan daerah;
- c. fasilitasi penyusunan Naskah Akademik dan Raperda inisiatif;
- d. verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan perundang-undangan,
- e. Pengumpulan bahan penyiapan raperda inisiatif;
- f. penyelenggaraan persidangan, penyusunan risalah rapat;
- g. pengkoordinasian pembahasan raperda;
- h. verifikasi, koordinasi dan evaluasi daftar inventaris masalah (DIM), risalah rapat;
- i. penyelenggaraan hubungan masyarakat, publikasi, keprotokolan;
- j. penyusunan tata tertib DPRD; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Persidangan dan perundang-undangan membawahi Sub Bagian Kajian Perundang-undangan dan Sub Bagian Persidangan, Risalah dan Publikasi.

e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyusunan program dan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD serta

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

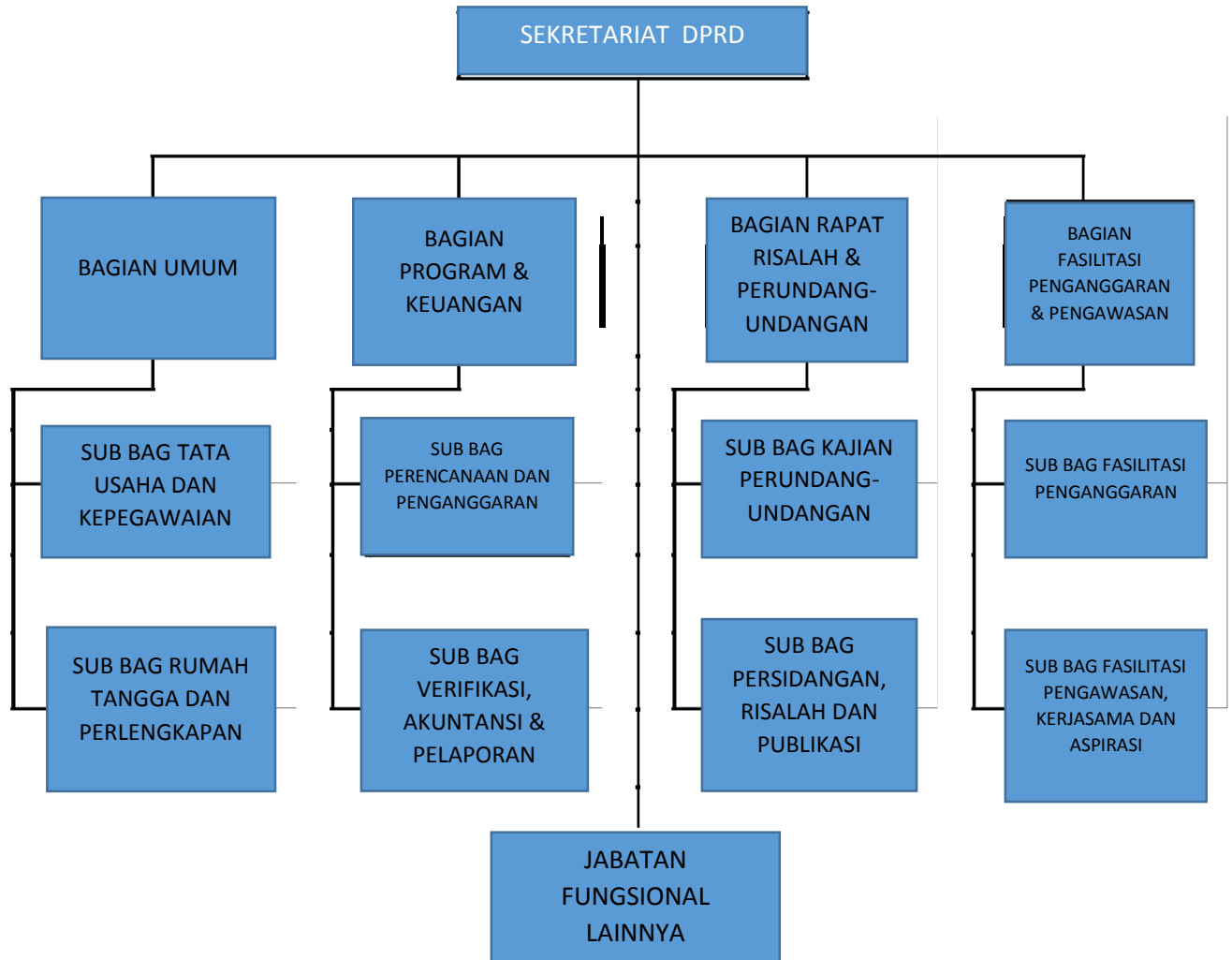
Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD;
2. Perumusan konsep kebijakan, pedoman pelaksanaan dan pedoman teknis di bidang penyusunan program dan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
3. Pengelola, pembinaan, fasilitasi, verifikasi bidang perumusan rencana kerja, program, kegiatan dan anggaran;
4. Pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi, dan pelayanan bidang pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
5. Pengelolaan, pembinaan, fasilitasi, verifikasi dan pelayanan bidang penatausahaan keuangan;
6. Pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
7. Pelaksanaan pengelolaan administrasi, data, dan informasi di bidang penyusunan program dan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD;
8. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan administrasi umum Bagian Keuangan;
9. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan membawahi Subbagian Fasilitasi Penganggaran dan Subbagian Fasilitasi Pengawasan, Kerjasama dan Aspirasi.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAGELANG

Sumber : Perbup No. 49 Tahun 2020



2.2. Sumber Daya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Magelang

Sumber daya aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana diatur dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 49 Tahun 2020. Terdata sejumlah 30 pegawai yang terdiri dari 28 PNS dan 2 orang CPNS, dimana 14 pegawai laki-laki dan 16 pegawai perempuan. Keseluruhan sumber daya manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Keseluruhan sumber daya manusia memiliki potensi dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang didukung oleh 28 orang PNS, 2 orang CPNS, 15 Tenaga Harian Lepas, 1 orang Tenaga Kontrak dan 1 orang tenaga supporting staff. Sedangkan pada jajaran struktural terdapat 1 orang eselon 2, 3 orang Eselon 3 dan 6 orang Eselon 4, sebagai mana dapat dilihat dalam tabel 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1

SDM SEKRETARIAT DPRD BERDASARKAN KELOMPOK JABATAN

No	Jabatan	Golongan	Jumlah	Jumlah Standar Pegawai	Kekurangan
A.	Jabatan Struktural		10 Orang	10 Orang	0 Orang
1.	Sekretaris	IV / b	1 Orang	1 Orang	0
2.	Kepala Bagian Umum	IV / b	1 Orang	1 Orang	0
3.	Kepala Bagian Persidangan dan Per Undang – Undangan	IV / b	1 Orang	1 Orang	0
4.	Kepala Bagaian Keuangan	IV/b	1 Orang	1 Orang	0
5.	Kasubbag Persidangan dan Rapat Risalah	III/d	1 Orang	1 Orang	0
6.	Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan	III/d	1 Orang	1 Orang	0
7.	Kasubbag Per Undang – Undangan	III/c	1 Orang	1 Orang	0
8.	Kasubbag Umum, Kepegawaian, Humas dan Protokol	III/c	1 Orang	1 Orang	0
9.	Kasubbag Keuangan	III/d	1 Orang	1 Orang	0
10.	Kasubbag Program	III / d	1 Orang	1 Orang	0
B.	Jabatan Fungsional Umum		15 Orang	26 Orang	11 Orang
1.	Penyusun Risalah	III / d	1 Orang	2 Orang	1
2.	Pengelola Persidangan	III / d	1 Orang	1 Orang	0

No	Jabatan	Golongan	Jumlah	Jumlah Standar Pegawai	Kekurangan
3.	Pengelola Persidangan	III/ b	3 Orang	3 Orang	0
4.	Pramu bakti	III/b	1 Orang	1 Orang	0
5.	Pramu Bakti	II / b	1 Orang	1 Orang	0
6.	Pramu bakti	I / c	1 Orang	1 Orang	0
7.	Pengadministrasi Kepegawaian	III / b	1 Orang	1 Orang	0
8.	Pengadministrasi Sarana Prasarana	III / b	1 Orang	1 Orang	0
9.	Pengelola Sarana Prasarana Kantor	II / d	1 Orang	4 Orang	3
10.	Pengemudi	I/ d	1 Orang	9 Orang	8
11.	Ajudan	III/a	1 Orang	2 Orang	1
12.	Verifikator Keuangan	III / c	1 Orang	1 Orang	0
13.	Bendahara	III/ a	1 Orang	1 Orang	0
C.	Jabatan Fungsional Khusus		3 Orang	5 Orang	2 Orang
1.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	III / b	1 Orang	1 Orang	0
2.	Pranata Komputer	II / d	1 Orang	2 Orang	1
3.	Pranata Humas	II/d	1 Orang	2 Orang	1
D.	CPNS		2 Orang	4 Orang	2 orang
1.	Arsipariss	II/c	1 Orang	2 Orang	1 Orang
2.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	III/a	1 Orang	2 Orang	1 Orang
Jumlah			30 Orang	47 Orang	17 Orang

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Bulan Juni 2021

Dari Tabel diatas, jumlah PNS di Sekretariat DPRD masih jauh dari ideal, dimana per Juni 2021 PNS di Sekretariat DPRD hanya 30 Orang, sedangkan idealnya 47 Orang.

Jadi masih kekurangan 17 orang PNS. Selama ini untuk menunjang Kinerja, Sekretariat DPRD mengangkat tenaga selain PNS yaitu tenaga kontrak, tenaga harian lepas dan supporting staf, yaitu 1 tenaga kontrak, 15 tenaga harian lepas dan 1 supporting staf.

Tabel 2.2
Jenjang Pendidikan SDM pada Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

No	Uraian	Jumlah (Orang)	Prosentase(%)
1	Pasca Sarjana (S2)	4	13,33
2	Sarjana (S1)	15	50.00
3	Diploma 3 /Akademi	3	10
4	SLTA	5	16.67
5	SLTP	2	6.67
6	SD	1	3.33
		30	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekreariat DPRD Bulan Juni 2021

Berdasarkan Tabel 2.2 di atas prosentasi tertinggi dilihat dari jenjang pendidikannya adalah Sarjana yaitu 50.00 %. Sedangkan minoritas dari jenjang pendidikan adalah SD, yaitu 3.33 %

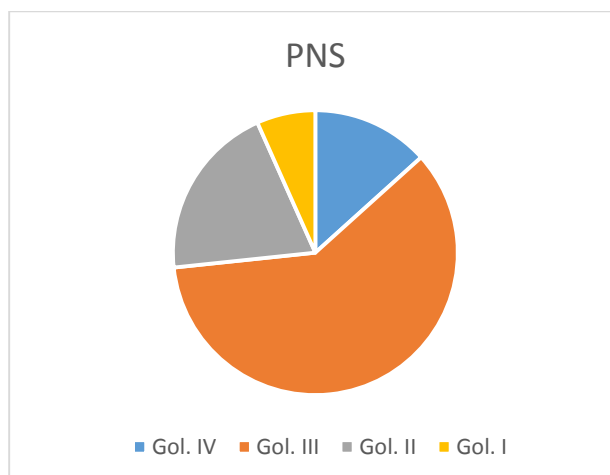
Tabel 2.3
Jumlah ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang
Berdasarkan Golongan/Pangkat

No.	Uraian	Posisi per 30 Juni 2021 (Orang)	Prosentase (%)
1	Golongan IV	4	13.33
2	Golongan III	18	60.0
3	Golongan II	6	20.0
4	Golongan I	2	6.67
	Total	30	100

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekreariat DPRD Bulan Juni 2021

Gambar 2.2

Diagram Karyawan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang
Berdasarkan Golongan/Pangkat



Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekreariat DPRD Bulan Juni 2021

Jumlah ASN Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang, sesuai data kepegawaian per 30 Juni 2021 adalah 27 Orang. Dilihat dari jumlah keanggotaan DPRD yaitu sejumlah 50 orang, dikatakan standar minimal kebutuhan pegawai, adalah sejumlah 45 orang. Jadi masih ada deviasi sekitar 18 orang kekurangannya.

Tabel 2.4

**Pendidikan Jabatan Struktural
SEKRETARIAT DPRD**

No.	Nama Pejabat	Jabatan	Pendidikan Struktural
1.	Ari Kuswardani, SH Pembina Tk I (IV/b) NIP.196703081995032003	Kabag Umum Eselon IIIa.	Diklat Pim. III Lulus 09-07-2013 (3178/Diklat Pim TK III/33/33.74/LAN/2013
2.	Sri Murni Ediyati, SH Pembina Tk. I(IV/b) NIP.	Kabag. Rapat Risalah & Perundang-undangan Eselon IIIa.	
3.	Indari, SE, M.Acc Penata Tingkat I (III/d) NIP. 196801121992032004	Kasubag. Keuangan Eselon IVa.	Diklat Pim. IV Lulus 12-10-2018 (00515/Diklat Tk. IV/04/3471/Kemendagr i/2018) (00006813/Diklat Pim Tk IV

4.	Katolani, S.Sos Penata (III/d) NIP. 196608071986081001	Kasubag Perlengkapan & Rumah Tangga Eselon IV.a	Diklat Pim. IV Lulus 02-11-2016 (09993/Diklat Pim TK IV/33/33.74/LAN/2016
----	--	---	--

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekreariat DPRD Bulan Juni 2021

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari sepuluh jabatan struktural dan sudah terisi semua. Dari sepuluh jabatan struktural yang sudah melaksanakan pendidikan struktural sesuai dengan jabatannya empat jabatan struktural.

2.3 Sarana dan Prasarana pada Sekretariat DPRD

Untuk kelancaran pencapaian tujuan/hasil tidak bisa lepas dari tersedianya sarana dan prasarana, karena sarana dan prasarana sangat berperan untuk mendukung kinerja SDM pada Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang. Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang meliputi berbagai macam jenis sebagaimana tercantum dalam tabel 2.5 berikut:

Tabel 2.3
Sarana dan Prasarana pada Sekretariat DPRD
KABUPATEN MAGELANG

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
1	2	3	4
1	Tanah Bangunan Gedung Kantor	2	Unit
2	Tanah Bangunan Rumah Negara	1	Unit
3	Kendaraan Bermotor Roda 2	14	Unit
4	Kendaraan Bermotor Roda 4	14	Unit
5	Buku dan perpustakaan Ilmu Pengetahuan Umum	135	Buku
6	Mesin Absensi Dewan	1	Buah
7	Papan Visual	9	Unit
8	Mesin Potong Rumput	2	Unit
9	Lemari es	7	Unit
10	AC	66	Unit
11	Kipas Angin	28	Unit
12	TV	5	Unit
13	Korden	518,45	M
14	Hardisk	6	Unit
15	Printer	21	Unit
16	Mesin ketik Manual Standard	4	Unit
17	Mesin ketik elektrik	1	Unit
18	Rak Kayu	7	Unit

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
19	Filling Besi	6	Unit
20	Lemari Kaca	7	Unit
21	Rak Arsip	5	unit
22	Papan Nama Instansi	5	unit
23	Papan Nama Pengumuman	1	unit
24	Papan Tulis	1	unit
25	Panel Pameran	1	unit
26	LCD Proyektor	4	unit
27	Lemari kayu	46	unit
28	Kursi Kayu/Rotan/Bambu	142	unit
29	Tempat Tidur kayu	4	unit
30	Meja Rapat	163	unit
31	Meja Telpon	8	unit
32	Meja Resepsionis	2	unit
33	Meja Panjang	1	unit
34	Kursi Rapat	349	unit
35	Kursi Tamu	2	unit
36	Kursi Putar	8	unit
37	Bangku Tunggu	9	unit
38	Sprei	2	unit
39	Meja Biro	4	unit
40	Meja 1/2 Biro	30	unit
41	Kursi Operator	1	unit
42	Jam Mekanis	1	unit
43	Jam Elektronik	7	Unit
44	Mesin Pengisap debu	2	unit
45	Exhause Fan	8	unit
46	Tabung Gas	1	unit
47	Microphone	94	unit
48	Power Supply	11	unit
49	Lambang Garuda	16	unit
50	Tiang Bendera	3	unit
51	Dispenser	20	unit
52	Handy Came	1	unit
53	Lain-lain	6	unit
54	Ceret	7	unit
55	Pigura	16	unit
56	Alat Pemadam	16	unit
57	PC	31	unit
58	Laptop	15	unit
59	Notebook	19	unit
60	Server	3	unit
61	Meja Kerja Non Struktural	5	unit
62	Kursi Ketua/Wakil	16	unit
63	Tape Recorder	5	unit
64	Faximile	2	unit

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan
65	Kursi Tamu Di ruang Ketua /Wakil	4	unit
66	Lemari Perpustakaan	12	unit
67	Buffet Kayu	3	unit
Sumber : KIB 31 Desember 2020			

Sarana dan prasarana Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang secara inti sudah mencukupi hanya perlu pemeliharaan peralatan kantor dan pemeliharaan gedung. Untuk Gedung DPRD yang lama diperlukan rehabilitasi besar dikarena sudah umur dan aus. Selain itu amanat pengarusuteraan gender dan disabilitas serta manula, diupayakan dimasukkan dalam RAB.

2.4 Kinerja Pelayanan Sekretariat Dewan Kabupaten Magelang

Kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang tahun 2019 – 2024 dapat dilihat dari perbandingan target dan realisasi kinerja tiap tahunnya, yang diuraikan pada tabel berikut

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Target Akhir Tahun Renstra	Realisasi Capaian Tahun 2020	Tingkat Capaian terhadap target akhir Renstra
					2020	2021	2022	2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.	Persentase Fasilitasi Layanan Produk- Produk Hukum Daerah	-	-	-	NA	100	100	100	100	100	100	100

Rata-rata target selama 3 (tiga) tahun mendatang dengan indikator kinerja yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah diharapkan 100% dengan pertimbangan beberapa tahun yang lalu.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendana Pelayanan Sekretariat DPRD
Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun 2020	Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun 2020
	2020	2021	2022	2023	2024		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PROGRAM MANAJEMEN ADMINISTRASI PELAYANAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN PERANGKAT	3.533.902.000	3.461.127.000	3.461.127.000	3.461.127.000	3.461.127.000	2.882.401.300	0,8
Kegiatan Pengelolaan Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	71.592.000	71.592.000	71.592.000	71.592.000	71.592.000	54.200.800	0,8
Kegiatan Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	1.334.661.000	1.334.661.000	1.334.661.000	1.334.661.000	1.334.661.000	1.153.120.696	0,9

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun 2020	Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun 2020
	2020	2021	2022	2023	2024		
Kegiatan Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000	224.275.280	3,5
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	601.077.000	601.077.000	601.077.000	601.077.000	601.077.000	523.286.923	0,9
Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	582.269.000	582.269.000	582.269.000	582.269.000	582.269.000	297.554.882	0,5
Kegiatan Rehabilitasi Sedan/Berat Gedung Kantor/Rumah Dinas/Gedung Pemerintah Lainnya	222.775.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	46.443.250	0,2

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun 2020	Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun 2020
	2020	2021	2022	2023	2024		
Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	656.528.000	656.528.000	656.528.000	656.528.000	656.528.000	583.519.469	0,9
PROGRAM PERENCANAAN KEUANGAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	82.235.000	95.390.000	83.012.000	97.453.000	97.907.000	39.416.377	0,5
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	77.129.000	77.129.000	77.129.000	77.129.000	77.129.000	37.309.102	0,5
Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	3.351.000	16.506.000	4.128.000	18.569.000	19.023.000	1.364.750	0,4
Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	1.755.000	742.525	0,4
PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEDINASAN DPRD	17.751.629.000	17.751.629.000	17.751.629.000	17.751.629.000	17.751.629.000	12.071.820.926	0,7
Penyelenggaraan Rapat-rapat DPRD	682.000.000	682.000.000	682.000.000	682.000.000	682.000.000	187.438.100	0,3

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Tahun 2020	Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun 2020
	2020	2021	2022	2023	2024		
Penyusunan dan Pembahasan Produk-produk Hukum	369.360.000	369.360.000	369.360.000	369.360.000	369.360.000	20.080.600	0,1
Peningkatan Kapasitas DPRD	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	10.904.555.576	0,7
Kegiatan Reses DPRD	958.346.000	958.346.000	958.346.000	958.346.000	958.346.000	454.699.900	0,5
Kegiatan Pelayanan Kehumasan dan Publikasi DPRD	632.096.000	632.096.000	632.096.000	632.096.000	632.096.000	505.046.750	0,8
Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	109.827.000	109.827.000	109.827.000	109.827.000	109.827.000	-	-

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran adalah yang hasil rasio tertinggi antar realisas dan anggaran yaitu 0,8. Sedangkan Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja merupakan nilai rasio terendah yaitu 0,5 sedangkan Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD adalah 0,7

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang

1. Kondisi internal yang terdiri atas kekuatan dan kelemahan

a. Kekuatan (***Strenght***)

Pada sisi kekuatan terdapat faktor-faktor strategi antar lain :

1. Eksistensi Lembaga Sekretariat DPRD sebagai bagian internal dan manajemen penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan penghubung antara Pemerintah Daerah selaku Eksekutif dan Lembaga DPRD selaku Legislatif sebagai penentu kebijakan akan senantiasa dipertahankan.
2. Dukungan anggaran yang mencukupi dalam memfasilitasi kegiatan DPRD
3. Kemandirian dalam rangka optimalisasi pelayanan terhadap Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
4. Dukungan Tenaga Ahli Fraksi, dan Kelompok Pakar

b. Kelemahan (***Weakness***)

1. Kurangnya kompetensi sumber daya Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam mengimbangi kemajuan teknologi Informasi.
2. Kurangnya kualitas / kompetensi tenaga *Legal Drafter* serta tidak sebanding dengan ruang lingkup tugas dan fasilitasi penyelenggaraan kedewanan.
3. Fasilitas Gedung yang sudah tua mengakibatkan besarnya anggaran pemeliharaan ataupun Rehabilitasi Gedung.

2. Kondisi eksternal yang terdiri atas peluang dan tantangan:

a. Tantangan /Ancaman/Hambatan (***Threats***)

Tantangan dalam upaya pengembangan pelayanan kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang adalah sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan yang profesional kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Perlunya meningkatkan pengetahuan di bidang Teknologi Informasi untuk membantu kelancaran kinerja, diharapkan output pekerjaan yang dihasilkan dapat lebih maksimal.

3. Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkualitas sesuai dengan kemampuan daerah.
4. Diperlukan penempatan pegawai yang sesuai dengan jenis pendidikan dan keahliannya.
5. Adanya tuntutan kualitas SDM aparatur/ASN dalam meningkatkan daya saing global.

b. Peluang (***Opportunities***)

Sedangkan peluang dalam upaya pengembangan pelayanan kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang sebagai berikut:

- a. Meningkatkan peran Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Meningkatkan sinergisitas penyusunan peraturan Perundangan-Pusat dan Peraturan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah.
- c. Mengoptimalkan pelaksanaan otonomi daerah di Kabupaten Magelang.
- d. Mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana publik, dan peningkatan kapasitas aparatur.
- e. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui peningkatan mutu pendidikan perbaikan taraf hidup ekonomi serta mengurangi ketimpangan sarana dan prasarana teknologi informasi antara pedesaan dan perkotaan.
- f. Meningkatkan kerjasama antar daerah melalui peningkatan kemampuan dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah melalui sinkronisasi peraturan daerah yang mendukung pelaksanaan kerjasama antar daerah.
- g. Mensinergikan regulasi/peraturan pengelolaan keuangan daerah dalam implementasi dan optimalisasi tertib.
- h. Meningkatkan inventarisasi aset daerah melalui penguatan manajemen aset dan pemanfaatan aset daerah.
- i. Mengoptimalkan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah.

- j. Mengoptimalkan tenaga periksa dan aparaturngawasan melalui dukungan peraturan perUndang-Undangan serta kesadaran hukum masyarakat.

Tabel 2.8

Komparasi Capaian Sasaran Renstra Sekretariat DPRD terhadap Sasaran Renstra SKPD Provinsi dan Renstra Kementerian/ Lembaga

No.	Indikator Kinerja	Capaian Sasaran Renstra OPD Kabupaten/Kota	Sasaran pada Renstra OPD Provinsi	Sasaran pada Renstra K/L
1.	Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah	Meningkatnya fasilitasi layanan lembaga DPRD	Capaian tingkat Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah	(-)

BAB. III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Magelang Nomer 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah merupakan instansi yang memberikan fasilitasi pada kegiatan DPRD dan menunjang terhadap keberhasilan pelaksanaan tugas DPRD. Tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD adalah melakukan pelayanan terhadap pelaksanaan kegiatan Tugas Pokok dan Fungsi DPRD.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, bahwa DPRD mempunyai fungsi Pembentukan Perda, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan.

Pada Fungsi Pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara :

- a. Menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah
- b. Membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda dan
- c. Mengajukan usul rancangan Perda

Fungsi Anggaran dilaksanakan dengan cara :

- a. Membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah.
- b. Membahas rancangan Perda tentang APBD
- c. Membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
- d. Membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:

- a. Pelaksanaan Perda dan peraturan Kepala Daerah;
- b. Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah; dan

c. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

Dalam memfasilitasi pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD ditemui beberapa faktor yang berpengaruh pada kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang antara lain sebagai berikut :

1. Bagian Umum

- Belum adanya Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang Mesin dan kelistrikan
- Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang keprotokoleran
- Belum Optimalnya pemeliharaan sarana dan prasarana dalam pelayanan terhadap masyarakat.
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang profesional di bidang kearsipan dan kepustakaan

2. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan

- Kurangnya tenaga komputer dalam pengoperasionalan sistem Notulensi Rapat-rapat
- Kurangnya koordinasi dengan pihak pemerintah daerah
- Belum optimalnya website yang dimiliki Sekretariat DPRD sebagai salah satu sarana informasi kegiatan DPRD dalam pelayanan terhadap masyarakat.

3. Bagian Program dan Keuangan

- Kurangnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan di bidang keuangan
- Kurangnya Sumber Daya Manusia yang profesional di Bagian Keuangan.

4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan

- Karena merupakan bagian yang baru, maka sarana prasana maupun sumber daya manusianya belum 100% terpenuhi.
- Kurangnya sumber daya manusia yang profesional di bidangnya

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap kinerja pelayanan Sekretariat DPRD di atas maka diidentifikasi melalui tabel berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan
Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum Optimalnya fasilitasi layanan lembaga DPRD	Belum optimalnya layanan kedinasan DPRD	Belum optimalnya fasilitasi raperda, kebijakan anggaran, rekomendasi DPRD

Dengan mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang, maka kita akan menemukan solusi dan penecahan masalahannya. Selama periode yang lalu belum optimal dalam memfasilitasi layanan lembaga DPRD dengan berbagai aspek dan tinjauan atau sisi pandangan. Baik itu dikarenakan sarana prasarana atau pun kualitas sumber daya manusianya yang atau pun faktor eksternalnya seperti kurang koordinasinya dengan stake holder maupun pihak eksekutif.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Pada awal tahun 2019 Pemerintah Kabupaten Magelang memasuki babak baru pembangunan daerah seiring terpilihnya pasangan Kepala Daerah baru. Dalam masa jabatannya pada 5 (lima) tahun mendatang Kepala daerah terpilih atau Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang mengusung Visi untuk menjadi pandangan bersama dalam pencapaian yang diinginkan hingga akhir periode.

Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Magelang untuk masa jabatan 2019 – 2024 yaitu

“Terwujudnya masyarakat kabupaten magelang yang sejahtera, berdaya saing dan amanah”

(*SEDAYA AMANAH*)

Pada rumusan visi ini terkandung substansi 3 kunci yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia, meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan, dan mewujudkan tata kelola pemerintah yang amanah, disingkat menjadi

“Sedaya Amanah”. Sedaya dalam bahasa jawa mempunyai arti semua (*sedoyo*) sehingga sedaya amanah bermakna bahwa seluruh pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan, di semua tingkatan, harus menjaga amanah dalam menjalankan peran dan fungsinya. Adapun makna dari ketiga kata kunci yang terkandung pada visi adalah sebagai berikut.

Sejahtera adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang sejahtera, yaitu kondisi yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi kebutuhan ekonomi (materiil) maupun sosial (spirituil), dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir batin secara adil dan merata. Dalam terminologi jawa adalah *wareg, wutuh, waras dan wasis*. *Wareg* adalah terpenuhinya kebutuhan pangan, *wutuh* adalah terpenuhinya kebutuhan sandang dan papan, *waras* adalah terjaminnya kesehatan masyarakat lahir batin, jasmani rohani dan *wasis* adalah terwujudnya masyarakat yang cerdas dan berakhlak mulia.

Berdaya saing adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang berdaya saing, yaitu kemampuan masyarakat untuk mencapai kemajuan yang lebih tinggi serta berkelanjutan di tengah persaingan dengan daerah lain baik domestik maupun internasional. Hal ini dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya yang dimiliki sehingga menjadi keunggulan kompetitif. Pada akhirnya daerah akan memiliki daya saing yang strategis dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif, budaya inovasi serta pengembangan dan pemanfaatan teknologi.

Amanah adalah terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang amanah, yaitu keinginan kuat untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, baik dan bersih yang ditandai dengan transparansi, partisipasi, inovasi dan akuntabel, sehingga mampu menciptakan dan menjaga solidaritas, kepercayaan, kejujuran, kerjasama, dan komitmen yang baik dalam pelayanan publik.

Dalam upaya mmewujudkan visi tersebut, maka misi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut:

MISI

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia

2. Meningkatkan daya saing daerah yang berbasis pada potensi lokal dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang, Misi yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang yaitu *Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah*. Dalam rangka mewujudkan misi Bupati terpilih, maka Sekretariat DPRD mempunyai beberapa kegiatan dalam Program strategis yang mendukung tercapainya tata kelola pemerintahan yang amanah, diantaranya:

- a. Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Produk Hukum memfasilitasi pimpinan dan anggota DPRD dalam pembahasan produk-produk hukum sehingga perda-perda dapat ditetapkan tepat waktu, merupakan komitmen DPRD dalam mengawal pelaksanaan perda dikaitkan dengan relevansi penggunaan hak pengawasan dengan kepentingan publik dan relevansi aktivitas penyerapan aspirasi DPRD dengan kebutuhan masyarakat sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah
- b. Dengan adanya Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD diharapkan Kompetensi Pimpinan dan anggota DPRD akan meningkat sehingga diharapkan pemerintahan yang demokratis akan terwujud. Pembahasan dan pengkajian Raperda dapat berjalan dengan baik dengan fasilitator Sekretariat DPRD sehingga dapat ditetapkan tepat waktu.
- c. Kegiatan Reses DPRD dapat menjaring aspirasi masyarakat dan dapat dijadikan wadah untuk tukar informasi masalah pemerintahan. Sehingga masyarakat dapat memantau apakah jalannya pemerintahan sesuai dengan Visi Kepala Daerah atau tidak.
- d. Melalui Bintek DPRD maupun ASN diharapkan terbangun pola pikir dan budaya kerja dalam mewujudkan kinerja DPRD yang aspiratif, transparan dan akuntabel.

Tabel 3.2

Telaah Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati

No.	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	<p>Visi: “Terwujudnya masyarakat kabupaten magelang yang sejahtera, berdaya saing dan amanah”</p> <p>Misi: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah</p>	<p>Tugas : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.</p>	<p>Belum optimalnya layanan kedinasan DPRD</p>	<p>Faktor Penghambat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi dan dokumentasi belum ter update secara online melalui web DPRD 2. Proses Penyusunan, pembahasan dan Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif, Peraturan DPRD dan Keputusan belum diselesaikan tepat waktu 3. Penyelenggaraan keprotokolan dan publikasi DPRD dan Sekretariat DPRD belum optimal 4. Peralihan pergantian antara DPRD lama dan baru
		<p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD 2. Penyelenggaraan administrasi Keuangan DPRD 3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD 4. Penyediaan dan pengoordinasian tenaga 		<p>Faktor Pendorong:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan pemenuhan fasilitasi kegiatan rapat risalah yang memadai. 2. Terpenuhinya Target kinerja Peningkatan Kapasitas DPRD diharapkan dapat memperlancar

No.	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		ahli yang diperlukan oleh DPRD 5. Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan daerah 6. Pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan daerah.		pembahasan Raperda

3.3 Telaah Renstra Sekretariat DPRD Provinsi dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

Sekretariat DPRD Prov Jateng berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayan Administrasi dan pemberian dukungn terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD Provinsi yang secara teknis operasional berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

a. Visi

- Meningkatkan kualitas fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan
- Menumbuh kembangkan sinergi antar alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Membangun hubungan yang harmonis antar Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemerintah Daerah dan Forum Muspida.
- Meningkatkan partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Meningkatkan komunikasi efektif dengan semua unsur masyarakat guna peningkatan kinerja Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Misi

Mendukung meningkatnya kualitas sumber daya manusia menuju Provinsi Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan berdikari di Tahun 2016 secara berkelanjutan melalui efektifitas pelaksana fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta penanganan aspirasi masyarakat.

c. Tugas

Sekretariat DPRD mempunyai tugas membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan..

d. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang melaksanakan fungsi, antara lain :

- Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Provinsi Jawa Tengah
- Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Provinsi Jawa Tengah
- Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan DPRD Provinsi Jawa Tengah
- Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi Jawa Tengah
- Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Tabel 3.3

Telaah Renstra Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah

No.	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Visi : "Menuju Jateng Sejahtera dan	Tugas: Sekretariat DPRD mempunyai tugas	Layanan Pendukung Pelaksanaa	Faktor Penghambat:

No.	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
	Berdikari, Tetep Mboten Ngapusi “ Misi : Mempercepat Reformasi Birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah Kabupaten/Kota, sistem layanan terintegrasi	membantu Gubernur menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan	n Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah belum optimal	1. Proses penyusunan, pembahasan dan pengkajian Raperda Inisiatif Legislatif/Eksekutif. Peraturan DPRD dan Keputusan belum diselesaikan tepat waktu 2. Informasi dan dokumentasi DPRD belum <i>up date</i> secara <i>on line</i> melalui media masa.
		1. Penyelenggaraan administrasi keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Jawa Tengah		1. Mempertahankan target capaian kunjungan kerja dan keikutsertaan workshop/bimtek oleh Pimpinan dan Anggota DPRD
		2. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah		3. Penyediaan pemenuhan fasilitasi kegiatan reses dan risalah rapat
		3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat Dewan Perwakilan		4. Mengupdate informasi dan dokumentasi DPRD melalui

No.	Visi/Misi/Program Kerja Kepala Daerah	Tupoksi Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Permasalahan	Faktor Penghambat dan Pendorong
		Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah		media secara <i>online</i>
		4. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya		5. Penyediaan pemenuhan publikasi DPRD dan Sekretariat DPRD
				5. Peningkatan penyelenggaraan keprotokolanan DPRD dan Sekretariat DPRD

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan KLHS pada RPJMD

Berdasarkan Permendagri No.7 tahun 2018 tentang penyusunan KLHS RPJMD. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (yang selanjutnya disebut KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program (Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH pasal 1 angka 10).

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2)

Peran perencanaan sangat penting dalam menentukan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan pembangunan

yang terpadu dan selaras dengan pendekatan pengembangan wilayah berbasis ekonomi dan ekologi. Untuk itu, dalam penyusunan dokumen perencanaan, sangat penting melihat aspek penataan ruang daerah secara komprehensif. Dalam penyusunan perencanaan perlu sinkronisasi terhadap pembinaan dan pengendalian pengembangan wilayah secara terpadu terus dilakukan. Hal ini sesuai dengan upaya pemerintah daerah untuk mengubah struktur perekonomian dengan memformulasikan tujuan penataan ruang daerah sebagai acuan dalam setiap aspek perencanaan.

Penyusunan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang, berdasarkan telaah, tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Renstra Sekretariat DPRD dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD diarahkan pada pengembangan SDM yang sejalan dengan muatan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. *Good Governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkann secara bersama.

Posisi DPRD sejalan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah memiliki posisi strategis dan menentukan keberhasilan dan kegagalan pemerintah daerah. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memiliki fungsi

legislasi, anggaran dan pengawasan. Fungsi Anggaran yang ada bersama kepala daerah menyusun serta menetapkan Anggaran Pendapatan yang ada atau Belanja Daerah (APBD) tiap tahun ke tahun. Fungsi Anggaran tersebut disertai fungsi pengawasan terhadap Peraturan Daerah APBD yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintah daerah telah diimplementasikan secara efektif dalam hubungan kepala daerah dan DPRD yang setara, tidak saling menjatuhkan dan bermitra untuk menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Namun demikian fungsi pengawasan DPRD belum berjalan maksimal untuk dapat mencapai misi dan tujuan yang ditetapkan Pemerintahan Daerah.

Belum optimalnya kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel menjadi isu strategis dalam mencapai visi, misi dan tujuan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Magelang periode 2019 - 2024. Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang sebagai mitra kerja DPRD yang memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan tugas pembantuan untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

A. Tujuan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaiannya dapat diukur berdasarkan faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. Tujuan sifatnya lebih konkrit daripada misi dan mengarah ke suatu titik terang pencapaian hasil, dengan adanya pernyataan tujuan yang ditetapkan, maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dicapai dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu dalam upaya menjabarkan visi dan misi Sekretariat DPRD menetapkan Tujuan dan Indikator tujuan.

Tujuan, yaitu :

- Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan

Indikator Tujuan :

- Nilai AKIP

B. Sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang diperoleh secara terukur dan nyata akan dicapai dalam setiap

tahun. Sasaran merupakan bagian internal dari perencanaan strategis SKPD bersifat spesifik, dapat diukur ketercapaiannya dengan berorientasi pada hasil untuk akhir periode, berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh Sekretariat DPRD maka sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

- Meningkatnya fasilitasi layanan lembaga DPRD

Indikator Sasaran, adalah sebagai berikut :

- Persentase fasilitasi layanan produk- produk hukum daerah

Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran beserta indikator capaiannya dapat dilihat pada table 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Tahun						Kondisi Akhir Kinerja
				2020		2021	2022	2023	2024	
				Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan		NILAI AKIP	%	58,82 (CC) angka (0-100)		59,05 (CC) angka (0-100)	61,04 (B) angka (0-100)	63,03 (B) angka (0-100)	65,02 (B) angka (0-100)	
	Meningkatnya Fasilitas Layanan Lembaga DPRD	Persentase Fasiitasi Layanan Produk- Produk Hukum Daerah	%	na	na	100	100	100	100	100

Tujaun dan sasaran jangka menengah yang akan kita capai selama 3(tiga) tahun kedepan diharapkan dengan persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah mencapai 100%, diharapkan dapat meningkatkan nilai AKIP 3 (tiga) tahun kedepan.

BAB. V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikator untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan maka diperlukan strategi sebagai landasan tindak lanjut untuk merespon isu strategi sebagai suatu cara atau pola untuk mewujudkan tujuan atas misi yang ditetapkan. Perumusan strategi dan arah kebijakan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang dapat dituangkan dalam tabel berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, berdaya saing dan amanah (SEDAYA AMANAH)			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	Meningkatnya Fasilitas Layanan Lembaga DPRD	Peningkatan Pelayanan Kedinasan DPRD	Meningkatkan kualitas fasilitasi raperda, kebijakan anggaran dan rekomendasi DPRD

Dengan meningkatkan kualitas fasilitasi raperda, kebijakan anggaran dan rekomendasi DPRD, diharapkan pelayanan kedinasan DPRD dapat meningkat sehingga akuntabilitas kinerja pemerintahan akan meningkat.

BAB. VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusunlah langkah-langkah rencana strategis yang telah dioperasionalkan kurun waktu 5 tahun (2019-2024), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dengan tetap mmengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Magelang 2019 -2024.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Strategi dan Program Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Tengah, kegiatan yang dilaksanakan mencakup 2(dua) program, dan 16 (enam belas) kegiatan, yaitu :

a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD
 - d) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi SKPD
 - d) Sub Kegiatan dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD
 - f) Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

- b) Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
- 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - c) Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - d) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - e) Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
 - b) Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - c) Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
 - c) Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel
 - d) Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - e) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - f) Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 8. Kegiatan Layanan dan Kesejahteraan DPRD
 - a) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 - c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check up DPRD

9. Layanan Administrasi DPRD

- a) Sub Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD
- b) Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- c) Sub Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

b) Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- a) Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- b) Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- c) Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
- d) Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
- e) Sub Kegiatan Penyusunan Tata Tertib DPRD

2. Kegiatan Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran

- a) Sub Kegiatan pembahasan KUA dan PPAS
- b) Sub Kegiatan Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- c) Sub Kegiatan Pembahasan APBD
- d) Sub Kegiatan Pembahasan APBD Perubahan
- e) Sub Kegiatan Pembahasan Pertanggungjawaban APBD

3. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- a) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
- b) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Infrastruktur
- c) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Kesejahteraan Rakyat
- d) Sub Kegiatan Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Perekonomian
- e) Sub Kegiatan Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
- f) Sub Kegiatan Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah

4. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD

- a) Sub Kegiatan Orientasi DPRD
- b) Sub Kegiatan Pendalaman Tugas DPRD
- c) Sub kegiatan Publikasi dan Dokumentasi Dewan

- d) Sub kegiatan Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- e) Sub Kegiatan Penyusunan Program Kerja DPRD
- 5. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
 - a) Sub Kegiatan Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 - b) Sub Kegiatan Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
 - c) Sub Kegiatan Pelaksanaan Reses DPRD
- 6. Kegiatan Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
 - a) Sub Kegiatan Penyusunan Kode Etik DPRD
 - b) Sub Kegiatan Pengawasan Kode Etik DPRD
- 7. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD
 - a) Sub Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 - b) Sub Kegiatan Fasilitas Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah
 - c) Sub Kegiatan Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD

Pagu Indikatif untuk melaksanakan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang pada Tahun 2019-2024 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditentukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Dengan ditetapkannya program dan indikasi kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun ke depan, maka diperlukan pendanaan indikatif dari setiap indikasi kegiatan dengan tujuan sebagai indikator keberhasilan atau ukuran keberhasilan Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan secara garis besar dapat dijelaskan pada tabel 6.1 berikut :

Tabel 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MAGELANG

1	2	3	4	5	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										16	17
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan				Nilai AKIP	63,03 (Baik)	0	65,02 (Baik)	48.700.664.045,00	67,01 (Baik)	43.773.753.632,00	69,00 (Baik)	43.701.148.606,00	71,00 (Sangat Baik)	46.511.504.709,00		
	Meningkatnya Fasilitasi Layanan Lembaga DPRD			Persentase Fasilitasi Layanan Produk- Produk Hukum Daerah	94%	0	94,44 %	48.700.664.045,00	100%	43.773.753.632,00	100%	43.701.148.606,00	100%	46.511.504.709,00		
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	na %	0	100%	35.019.198.295,00	100%	34.253.748.900,00	100%	34.279.248.900,00	100%	36.581.198.900,00		
				2. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	na %		100%		100%		100%		100%			
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	na dokumen	0	29 dokumen	22.527.000,00	30 dokumen	14.517.000,00	30 dokumen	14.517.000,00	30 dokumen	14.517.000,00		
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	na Dokumen	0	1 Dokumen	5.007.000,00	0 Dokumen	13.289.000,00	0 Dokumen	13.289.000,00	1 Dokumen	13.289.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
				2. Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	na Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen		2 Dokumen			
				3. Jumlah Dokumen RKA-RKAP/DPA-DPPA	na Dokumen		na Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen		4 Dokumen			
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Rakor Penyusunan Dok RKA PD	na kali	0	1 kali	8.932.000,00	na kali	0	na kali	0	na kali	0	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan DPA	na Paket	0	1 Paket	3.000.000,00	na Paket	0	na Paket	0	na Paket	0	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA	na Paket	0	1 Paket	4.466.000,00	na Paket	0	na Paket	0	na Paket	0	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan, monitoring dan evaluasi yang tersusun	na Laporan	0	23 Laporan	1.122.000,00	23 Laporan	1.228.000,00	23 Laporan	1.228.000,00	23 Laporan	1.228.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG

		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan pengelolaan administrasi keuangan PD	na Bulan	0	36 Bulan	3.191.410.000,00	14 Bulan	3.430.471.000,00	14 Bulan	3.430.471.000,00	14 Bulan	3.430.471.000,00		
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya Gaji dan Tunjangan ASN	na Bulan	0	14 Bulan	3.109.010.000,00	14 Bulan	3.332.368.000,00	14 Bulan	3.332.368.000,00	14 Bulan	3.332.368.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Bulan yang mengelola kegiatan rutin	na Bulan	0	12 Bulan	55.200.000,00	na Bulan	0	na Bulan	0	na Bulan	0	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Verifikasi Keuangan	na bulan	0	3 bulan	1.000.000,00	12 bulan	98.103.000,00	12 bulan	98.103.000,00	12 bulan	98.103.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
				2. Jumlah Koordinasi Laporan Keuangan dan pemeriksaan BPK	na Kali	0	na Kali	12 Kali	12 Kali	12 Kali						
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi	na Kali	0	4 Kali	20.000.000,00	na Kali	0	na Kali	0	na Kali	0	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Frekuensi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir	na kali	0	1 kali	5.000.000,00	na kali	0	na kali	0	na kali	0	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Frekuensi Penyajian Bahan Tanggapan Pemeriksaan	na kali	0	1 kali	200.000,00	na kali	0	na kali	0	na kali	0	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	na Kali	0	4 Kali	500.000,00	na Kali	0	na Kali	0	na Kali	0	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	na Pelaporan	0	1 Pelaporan	500.000,00	na Pelaporan	0	na Pelaporan	0	na Pelaporan	0	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan kepegawaian	na Kegiatan	0	13 Kegiatan	353.709.000,00	13 Kegiatan	406.062.000,00	14 Kegiatan	431.562.000,00	15 Kegiatan	499.172.000,00		
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	tersedianya Pakaian Dinas ASN	na jenis	0	na jenis	0	na jenis	0	1 jenis	25.500.000,00	2 jenis	93.110.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bintek yang diikuti oleh aparatur	na Kali	0	13 Kali	353.709.000,00	13 Kali	406.062.000,00	13 Kali	406.062.000,00	13 Kali	406.062.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	na kegiatan	0	5 kegiatan	613.240.200,00	5 kegiatan	687.933.000,00	5 kegiatan	687.933.000,00	5 kegiatan	687.933.000,00		
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Plaket yang dibeli	na Unit	0	150 Unit	56.250.000,00	150 Unit	58.200.000,00	150 Unit	58.200.000,00	150 Unit	58.200.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	na Jenis	0	5 Jenis	19.260.000,00	4 Jenis	21.420.000,00	5 Jenis	21.420.000,00	5 Jenis	21.420.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG

		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Frekuensi Jamuan yang terlaksana	na bulan	0	12 bulan	318.480.000,00	12 bulan	209.690.000,00	12 bulan	209.690.000,00	12 bulan	209.690.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Frekuensi Rapat Koordinasi yang terlaksana 2. Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang Terlaksana 3. Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana	na Kali na kali na Kali	0	6 Kali 13 kali 29 Kali	188.987.200,00	6 Kali 10 kali 26 Kali	368.360.000,00	6 Kali 10 kali 26 Kali	368.360.000,00	6 Kali 10 kali 26 Kali	368.360.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	na Arsip	0	2700 Arsip	30.263.000,00	2500 Arsip	30.263.000,00	2500 Arsip	30.263.000,00	2500 Arsip	30.263.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	na Unit	0	13 Unit	824.170.000,00	12 Unit	90.000.000,00	12 Unit	90.000.000,00	12 Unit	90.000.000,00		
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan mebel dan perlengkapan gedung kantor	na Unit	0	9 Unit	61.500.000,00	2 Unit	38.000.000,00	2 Unit	38.000.000,00	2 Unit	38.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	na unit	0	2 unit	747.670.000,00	9 unit	52.000.000,00	9 unit	52.000.000,00	9 unit	52.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	na Jenis	0	2 Jenis	15.000.000,00	na Jenis	0	na Jenis	0	na Jenis	0	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	na kali	0	215 kali	147.155.000,00	215 kali	167.000.000,00	215 kali	167.000.000,00	215 kali	167.000.000,00		
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	na surat	0	2250 surat	15.955.000,00	2000 surat	17.000.000,00	2000 surat	17.000.000,00	2000 surat	17.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening air, listrik dan telepon dalam setahun	na Rekening	0	36 Rekening	131.200.000,00	36 Rekening	150.000.000,00	36 Rekening	150.000.000,00	36 Rekening	150.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	na jenis	0	6 jenis	1.029.233.895,00	5 jenis	963.521.000,00	5 jenis	963.521.000,00	5 jenis	963.521.000,00		
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara	na Unit	0	14 Unit	372.327.689,00	14 Unit	328.303.000,00	14 Unit	328.303.000,00	14 Unit	328.303.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	na Unit	0	14 Unit	173.699.515,00	14 Unit	166.868.000,00	14 Unit	166.868.000,00	14 Unit	166.868.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG

		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebelair yang dipelihara	na Unit	0	21 Unit	10.500.000,00	13 Unit	6.300.000,00	13 Unit	6.300.000,00	13 Unit	6.300.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	na Jenis	0	9 Jenis	28.050.000,00	9 Jenis	28.050.000,00	9 Jenis	28.050.000,00	9 Jenis	28.050.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor dan Rumdin	na Gedung	0	2 Gedung	326.626.900,00	3 Gedung	434.000.000,00	3 Gedung	434.000.000,00	3 Gedung	434.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rumdin Ketua DPRD yang terpelihara	na gedung	0	1 gedung	118.029.791,00	na gedung	0	na gedung	0	na gedung	0	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan dan Kesejahteraan DPRD	na jenis	0	3 jenis	28.161.652.000,00	3 jenis	27.788.095.000,00	3 jenis	27.788.095.000,00	3 jenis	30.022.435.000,00		
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terlaksananya Administrasi Keuangan DPRD	na Bulan	0	14 Bulan	27.890.145.000,00	14 Bulan	27.454.095.000,00	14 Bulan	27.454.095.000,00	14 Bulan	29.688.435.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah seragam dan atribut yang disediakan	na jenis	0	2 jenis	215.500.000,00	2 jenis	230.000.000,00	2 jenis	230.000.000,00	2 jenis	230.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.15.03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang diberikan jasa jaminan pemeliharaan Kesehatan	na Anggota Dewan	0	50 Anggota Dewan	56.007.000,00	50 Anggota Dewan	104.000.000,00	50 Anggota Dewan	104.000.000,00	50 Anggota Dewan	104.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	na Sub Kegiatan	0	3 Sub Kegiatan	676.101.200,00	3 Sub Kegiatan	706.149.900,00	3 Sub Kegiatan	706.149.900,00	3 Sub Kegiatan	706.149.900,00		
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.16.02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Rapat Fraksi yang terlaksana	na Kali	0	12 Kali	29.160.000,00	12 Kali	29.160.000,00	12 Kali	29.160.000,00	12 Kali	29.160.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.16.03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1. Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang Terlaksana 2. Jumlah Rapat di Luar Kantor	na kali na kali	0	78 kali 5 kali	646.941.200,00	74 kali 5 kali	556.989.900,00	74 kali 5 kali	556.989.900,00	74 kali 5 kali	556.989.900,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.01.2.16.04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tercukupinya Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD	na Bulan	0	na Bulan	0	12 Bulan	120.000.000,00	12 Bulan	120.000.000,00	12 Bulan	120.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	1. Persentase pemenuhan fasilitasi Raperda 2. Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran 3. Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD 4. Persentase Pemenuhan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD 5. Persentase Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6. Persentase Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD 7. Persentase Pemenuhan Fasilitasi Tugas DPRD	na % na % na % na % na % na % na %	0	83,33 % 100% 100% na % na % na % na %	13.681.465.750,00	100% 100% 75% 83,33% 100% 75% 75%	9.520.004.732,00	100% 100% 75% 83,33% 100% 75% 75%	9.421.899.706,00	100% 100% 75% 100% 100% 75% 75%	9.930.305.809,00		

		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Kegiatan Pendukung Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	na Jenis	0	4 Jenis	1.725.752.800,00	4 Jenis	1.175.682.000,00	4 Jenis	1.175.682.000,00	5 Jenis	1.300.682.000,00		
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1. Jumlah Rapat Bapemperda 2. Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	na Kali na kali	0	10 Kali 3 kali	143.783.900,00	10 Kali 3 kali	229.425.000,00	10 Kali 3 kali	229.425.000,00	10 Kali 3 kali	229.425.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	1. Jumlah Rapat Rapat Pansus yang terlaksana 2. Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana	na kali na kali	0	10 kali 2 kali	584.736.900,00	10 kali 2 kali	577.295.000,00	10 kali 2 kali	577.295.000,00	10 kali 2 kali	577.295.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	1. Jumlah Kajian yang terlaksana 2. Jumlah Rapat 3. Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	na Kali na kali na kali	0	8 Kali 7 kali 3 kali	756.495.500,00	2 Kali 2 kali 2 kali	209.481.000,00	2 Kali 2 kali 2 kali	209.481.000,00	2 Kali 2 kali 2 kali	209.481.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	1. Jumlah Dokumen NA 2. Jumlah Rapat Bapemperda 3. Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah Bapemperda	na Kali na kali na kali	0	4 Kali 0 kali 4 kali	240.736.500,00	2 Kali 2 kali 2 kali	159.481.000,00	2 Kali 2 kali 2 kali	159.481.000,00	2 Kali 2 kali 2 kali	159.481.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	1. Jumlah Rapat Pembahasan Penyusunan Tata Tertib DPRD 2. Jumlah Perjalanan Dinas LD	na Kali na Kali	0	0 Kali 0 kali	0	0 Kali 0 kali	0	0 Kali 0 kali	0	10 Kali 1 kali	125.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	na Jenis	0	5 Jenis	1.038.356.400,00	5 Jenis	1.256.773.000,00	5 Jenis	1.256.773.000,00	5 Jenis	1.256.773.000,00		
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	1. Jumlah Rapat Banggar 2. Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah 3. Jumlah Rapat Luar Daerah	na Kali na kali na kali	0	5 Kali 2 kali 1 kali	364.857.400,00	10 Kali 2 kali 0 kali	313.224.000,00	10 Kali 2 kali 0 kali	313.224.000,00	10 Kali 2 kali 0 kali	313.224.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1. Jumlah Rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2. Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah 3. Jumlah Rapat Luar Daerah	na Kali na kali na Kali	0	5 Kali 1 kali 0 kali	263.845.000,00	8 Kali 1 kali 0 kali	312.871.000,00	8 Kali 1 kali 0 kali	312.871.000,00	8 Kali 1 kali 0 kali	312.871.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.03	Pembahasan APBD	1. Jumlah Rapat Pembahasan APBD 2. Jumlah Perjalanan Dinas 3. Jumlah Rapat Luar Daerah	na Kali na kali na Kali	0	7 Kali 2 kali 1 kali	241.854.000,00	6 Kali 1 kali 0 kali	168.801.000,00	6 Kali 1 kali 0 kali	168.801.000,00	6 Kali 1 kali 0 kali	168.801.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG

		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	1. Jumlah Rapat-rapat	na kali	0	5 kali	152.200.000,00	5 kali	162.557.000,00	5 kali	162.557.000,00	5 kali	162.557.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
				2. Jumlah Perjalanan dinas luar daerah	na kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
				3. Jumlah Rapat Luar Daerah	na Kali		0 Kali		0 Kali		0 Kali		0 Kali			
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1. Jumlah Rapat Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	na Kali	0	5 Kali	15.600.000,00	5 Kali	299.320.000,00	5 Kali	299.320.000,00	5 Kali	299.320.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
				2. Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	na kali		0 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
				3. Jumlah Rapat Luar Daerah	na Kali		0 Kali		0 Kali		0 Kali		0 Kali			
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah kegiatan fasilitasi pembahasan pengawasan pemerintahan	na kali	0	6 kali	703.142.500,00	6 kali	643.415.000,00	6 kali	643.415.000,00	6 kali	643.415.000,00		
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	1. Jumlah Rapat Komisi I yang terlaksana	na Kali	0	7 Kali	157.072.500,00	12 Kali	83.966.000,00	12 Kali	83.966.000,00	12 Kali	83.966.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
				2. Jumlah perjalanan Dinas LD Komisi I	na kali		5 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	1. Jumlah Rapat Komisi III yang terlaksana	na Kali	0	7 Kali	164.512.500,00	10 Kali	90.185.500,00	10 Kali	90.185.500,00	16 Kali	90.185.500,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
				2. Jumlah Perjalanan Dinas LD Komisi III	na Kali		5 kali		5 Kali		5 Kali		5 Kali			
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1. Jumlah Rapat Komisi IV yang terlaksana	na Kali	0	7 Kali	150.735.000,00	7 Kali	72.195.500,00	7 Kali	72.195.500,00	7 Kali	72.195.500,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
				2. Jumlah Perjalanan Dinas LD Komisi IV	na kali		2 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	1. Jumlah Rapat Komisi II yang terlaksana	na Kali	0	7 kali	152.572.500,00	7 Kali	83.781.000,00	7 Kali	83.781.000,00	7 Kali	83.781.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
				2. Jumlah Perjalanan Dinas LD Komisi II	na kali		3 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1. Jumlah Rapat Rapat Membahas Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	na Kali	0	0 Kali	50.000.000,00	0 Kali	100.307.000,00	0 Kali	100.307.000,00	0 Kali	100.307.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
				2. Jumlah Perjalanan Dinas LD Badan Anggaran	na kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1. Jumlah Rapat Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	na Kali	0	5 Kali	28.250.000,00	5 Kali	212.980.000,00	5 Kali	212.980.000,00	5 Kali	212.980.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
				2. Jumlah Perjalanan Dinas LD Badan Anggaran	na kali		0 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	na kali	0	5 kali	2.728.859.800,00	5 kali	2.480.389.000,00	5 kali	2.480.389.000,00	6 kali	2.888.307.000,00		
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah kegiatan orientasi DPRD	na kali awal masa jabatan	0	0 kali awal masa jabatan	0	0 kali awal masa jabatan	0	0 kali awal masa jabatan	0	1 kali awal masa jabatan	337.700.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.02	Bimbingan Teknis DPRD	Frekuensi BinteK DPRD	na Kali	0	6 Kali	1.894.650.000,00	6 Kali	1.859.574.000,00	6 Kali	1.859.574.000,00	5 Kali	1.859.574.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Kegiatan Kehumasan DPRD	na Kegiatan	0	6 Kegiatan	604.119.800,00	4 Kegiatan	200.000.000,00	4 Kegiatan	200.000.000,00	4 Kegiatan	270.218.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	na orang	0	6 orang	45.290.000,00	6 orang	45.290.000,00	6 orang	45.290.000,00	6 orang	45.290.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	na Kali	0	7 Kali	184.800.000,00	7 Kali	185.090.000,00	7 Kali	185.090.000,00	7 Kali	185.090.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG

		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.04.07	Penyusunan Program Kerja DPRD	1. Jumlah Perjalanan Dinas LD Banmusy dan Gabungan Pimpinan	na Kali	0	0 Kali	0	1 Kali	190.435.000,00	1 Kali	190.435.000,00	1 Kali	190.435.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
				2. Jumlah Rapat-rapat Banmusy dan Gabungan Pimpinan	na kali		0 kali		5 kali		5 kali		5 kali			
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	na Jenis	0	2 Jenis	562.593.000,00	3 Jenis	560.144.000,00	3 Jenis	570.575.335,00	3 Jenis	760.144.000,00		
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD	na kali	0	1 kali	19.997.000,00	1 kali	17.955.000,00	1 kali	17.955.000,00	1 kali	17.955.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	1. Jumlah Rapat-rapat Fraksi penyusunan pokok-poko pikiran DPRD yang terlaksana	na Kali	0	0 Kali	0	0 Kali	0	3 Kali	10.431.335,00	3 Kali	200.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
				2. Jumlah Perjalanan Dinas LD	na Kali		0 Kali		0 Kali		0 Kali		1 Kali			
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Frekuensi Reses DPRD	na kali	0	3 kali	542.596.000,00	3 kali	542.189.000,00	3 kali	542.189.000,00	3 kali	542.189.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Kegiatan Kode Etik DPRD	na Jenis	0	1 Jenis	89.932.500,00	1 Jenis	41.748.000,00	1 Jenis	41.748.000,00	2 Jenis	201.758.000,00		
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	1. Jumlah Rapat-rapat Penyusunan Kode Etik DPRD	na kali	0	0 kali	0	0 kali	0	0 kali	0	5 kali	160.010.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
				2. Jumlah Perjalanan Dinas LD	na Kali		0 Kali		0 Kali		0 Kali		1 Kali			
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.06.02	Pengawasan Kode Etik DPRD	1. Jumlah Rapat Badan Kehormatan	na kali	0	10 kali	89.932.500,00	5 kali	41.748.000,00	5 kali	41.748.000,00	5 kali	41.748.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
				2. Jumlah Perjalanan Dinas LD Badan Kehormatan	na kali		3 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD	na Jenis	0	3 Jenis	6.832.828.750,00	3 Jenis	3.361.853.732,00	3 Jenis	3.253.317.371,00	3 Jenis	2.879.226.809,00		
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	1. Jumlah Perjalanan Dinas LD	na kali	0	27 kali	6.110.927.250,00	27 kali	2.819.183.732,00	27 kali	2.710.647.371,00	27 kali	2.107.785.809,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
				2. Jumlah Rapat-rapat terkait koordinasi dan konsultasi	na kali		45 kali		30 kali		30 kali		30 kali			
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.03	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan	1. Jumlah Rapat Badan	na Kali	0	5 Kali	300.382.500,00	5 Kali	121.441.000,00	5 Kali	121.441.000,00	5 Kali	121.441.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
				2. Jumlah Perjalanan Dinas LD	na kali		3 kali		1 kali		1 kali		1 kali			
		4.02.4.02.0.00.0.00.01.0000.02.2.08.04	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1. Jumlah Rapat-rapat terkait Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	na kali	0	71 kali	421.519.000,00	71 kali	421.229.000,00	71 kali	421.229.000,00	71 kali	650.000.000,00	SEKRETARIAT DPRD	KABUPATEN MAGELANG
				2. Jumlah Perjalanan Dinas LD Pimpinan DPRD	na Kali		20 Kali		20 Kali		20 Kali		20 Kali			
		Jumlah				0		48.700.664.045,00		43.773.753.632,00		43.701.148.606,00		46.511.504.709,00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

Pada bab ini juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. IKU merupakan indikator tujuan dan/atau sasaran yang telah dirumuskan pada Bab IV.

Dokumen Perubahan Renstra adalah dokumen perubahan rencana pembangunan Perangkat Daerah (SKPD) untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Sekretariat DPRD berpedoman kepada dokumen Perubahan RPJMD. Dengan demikian, maka substansi program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Perubahan Renstra telah selaras dan serasi dengan program yang ada pada dokumen Perubahan RPJMD, termasuk pagu pendanaan indikatif untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Dibawah ini disajikan target capaian kinerja yang ingin dihasilkan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Dari tabel 7.1 dibawah ini, dapat dijelaskan bahwa target capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD adalah Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah rata-rata sebesar 100 persen.

Tabel 7.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Perubahan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja
			2020		2021	2022	2023	2024	
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatnya Fasilitas Layanan Lembaga DPRD Persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah	%	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%

Berdasarkan perumusan persentase fasilitasi layanan produk-produk hukum daerah, kita menargetkan selama 4 tahun mendatang 100% dengan perumusan =

“(((jumlah raperda yang dibahas/jumlah Raperda yang masuk propemperda)x100%)+(jumlah fasilitasi kebijakan anggaran yang disepakati tepat waktu/jumlah fasilitasi kebijakan anggaran yang harus disepakati)x100%) + (jumlah fasilitasi rekomendasi dan catatan khusus DPRD /jumlah fasilitasi rekomendasi catatan khusus DPRD yang direncanakan) x 100%)))/3”

Selain IKU perangkat daerah, juga ditetapkan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan masing-masing perangkat daerah yang merujuk pada indikator program pada Bab VI. Indikator kinerja ditampilkan dalam tabel 7.2 dibawah ini :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	%	na	na	100%	100%	100%	100%		

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
	2. Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan perangkat daerah	%	na	na	100%	100%	100%	100%		
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Perangkat Daerah	Dokumen	na	na	29	25	25	26		
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	na	na	1	0	0	1		

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
	2. Jumlah dokumen renja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	na	na	2	2	2	2		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Rakor Penyusunan Dok R PD	Kali	Na	Na	1	0	0	0		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi penyusunan DPA	Paket	Na	Na	1	0	0	0		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi penyusunan Perubahan DPA	Paket	Na	na	1	0	0	0		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan, monitoring dan evaluasi yang tersusun	Laporan	Na	na	23	23	23	23		

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan yang dikelola	Kegiatan	Na	na	18	18	18	18		
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercukupinya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	Na	na	14	14	14	14		
Sub Keg. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan yang mengelola kegiatan rutin	Bulan	Na	na	12	na	na	na		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah pelaksanaan dan verifikasi keuangan	Jenis	Na	na	3	3	3	3		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah koordinasi pelaksanaan akuntansi	Kali	Na	na	4	na	na	na		

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Frekuensi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir	Kali	na	na	1	na	na	na		
Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Frekuensi Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Kali	na	na	1	na	na	na		
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	Kali	na	na	4	na	na	na		
Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Pelaporan	na	na	1	na	na	na		
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan administrasi kepegawaian	Kegiatan	na	na	14	14	14	14		

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Sosialisasi Perda yang dilaksanakan	Kali	na	na	1	1	1	1		
Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah bintek yang diikuti oleh aparatur	Kali	na	na						
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	Kegiatan	na	na	5	5	5	5		
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah plaket yang dibeli	Unit	na	na	150	150	150	150		
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	Jenis	na	na	6	6	6	6		

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
Perundang-undangan										
Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu	Frekuensi Jamuan yang terlaksana	Bulan	na	na	12	12	12	12		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Frekuensi Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang terlaksana	Kali	na	na	29	47	47	47		
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	Arsip	na	na	2500	2500	2500	2500		
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah paket pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Kegiatan	na	na	13	12	12	12		

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
Pengadaan Mebel	Jumlah paket pengadaan mebel dan perlengkapan gedung kantor	Unit	na	na	9	7	7	7		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	unit	na	na	2	10	10	10		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	Jenis	na	na	2	na	na	na		
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	Kali	na	na	215	215	215	215		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikelola	Surat	na	na	2250	2000	2000	2000		

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening air, telpon dalam setahun	Rekening	na	na	36	36	36	36		
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	unit	na	na	81	81	81	81		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipeihara	Unit	na	na	17	12	12	12		

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional yang dipeihara	Unit	na	na	14	14	14	14		
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebelair yang dipelihara	unit	na	na	21	21	21	21		
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Jenis	na	na	2	2	2	2		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket rehabilitasi sedang/Berat Gudung Kantor dan rumdin	Gedung	na	na	2	2	2	2		

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
Sub Kegiatan Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Rumdin Ketua DPRD yang terpelihara	Gedung	na	na	1	na	na	na		
Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Terfasilitasi Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kali	na	na	15	15	15	15		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Terlaksananya Administrasi Keuangan DPRD	Bulan	na	na	14	14	14	14		
Sub Kegiatan Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah seragam dan atribut yang disediakan	Jenis	na	na	2	1	1	2		

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
Sub Kegiatan Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang diberikan jasa jaminan pemeliharaan Kesehatan	Anggota Dewan	na	na	50	50	50	50		
Kegiatan Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	Kegiatan	na	na	77	77	77	77		
Sub Kegiatan Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah rapat fraksi yang terlaksana	Kali	na	na	12	12	12	12		
Sub Kegiatan Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah perjalanan dinas luar daerah yang terlaksana	Kali	na	na	26	26	26	26		
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tercukupinya Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD	Bulan	na	na	na	12	12	12		

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	1. Persentase pemenuhan fasilitasi Raperda	Persen	83,33	100	83,33	100	100	100		
	2. Persentase pemenuhan fasilitasi kebijakan Anggaran	Persen	100	100	100	100	100	100		
	3. Persentase pemenuhan fasilitasi kebijakan Rekomendasi DPRD	Persen	100	100	100	75	75	75		
	4. Persentase pemenuhan fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD	Persen	na	na	na	83,33	83,33	100		

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab	
			2020		2021	2022	2023			2024
			Target	Realisasi	Target	Target	Target			Target
	5. Persentase pemenuhan fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persen	na	na	na	100	100	100		
	6. Persentase pemenuhan fasilitas Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persen	na	na	na	75	75	75		
	6. Persentase pemenuhan fasilitas Tugas DPRD	Persen	na	na	na	75	75	75		

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
Keg. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Kegiatan Pendukung Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	Kali	na	na	34	58	58	58		
Sub Kegiatan Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Rapat-Rapat dan Perjalanan dinas terkait program pembentukan PERDA yang terlaksana	Kali	na	Na	15	12	12	12		

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
Sub Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Rapat- rapat dan perjalanan dinas pembahasan rancangan peraturan daerah yang terlaksana	Kali	na	Na	10	18	18	18		
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan	Jumlah Kegiatan penyelenggara an Kajian Perundang- undangan	Kali	na	Na	7	14	14	14		
Sub Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keteran- gan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah dokumen NA dan rapat- rapat penyusunan raperda inisiatif yang terlaksana	Kali	na	Na	2	14	14	14		

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
Keg.Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jenis	na	Na	5	5	5	5		
Sub Keg. Pembahasan KUA dan PPAS	- Jumlah Rapat Banggar	Kali	na	Na	5	10	10	10		
	- Jumlah Perjalanan Dinas LD	Kali	na	Na	2	2	2	2		
	- Jumlah perjalanan Meeting	Kali	na	Na	1	0	0	0		
Sub. Keg. Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	- Jumlah Rapat Banggar	Kali	na	Na	5	8	8	8		
	- Jumlah Perjalanan Dinas LD	Kali	na	Na	1	1	1	1		

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
	- Jumlah perjalanan Meeting	Kali	na	Na	0	0	0	0		
Sub Keg. Pembahasan APBD	- Jumlah Rapat Banggar	Kali	na	Na	7	6	6	6		
	- Jumlah Perjalanan Dinas LD	Kali	na	Na	2	1	1	1		
	- Jumlah perjalanan Meeting	Kali	na	Na	1	0	0	0		
Sub Keg. Pembahasan APBD Perubahan	- Jumlah Rapat Banggar	Kali	na	Na						
Sub Keg. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	- Jumlah Rapat Banggar	Kali	na	Na	5	5	5	5		
	- Jumlah Perjalanan Dinas LD	Kali	na	Na	0	1	1	1		

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
Keg. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Fasilitasi Pembahasan pengawasan Pemerintahan		na	Na						
Sub Keg. Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	- Jumlah Rapat Komisi	Kali	na	Na						
	- Jumlah Perjalanan Dinas Komisi I	Kali	na	Na						
Sub Keg. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	- Jumlah Rapat Komisi	Kali	na	Na						
	- Jumlah Perjalanan Dinas Komisi III	Kali	na	Na						

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
Sub Keg. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	- Jumlah Rapat Komisi	Kali	na	Na						
	- Jumlah Perjalanan Dinas Komisi IV	Kali	na	Na						
Sub. Keg. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	- Jumlah Rapat Komisi	Kali	na	Na						
	- Jumlah Perjalanan Dinas Komisi II	Kali	na	Na						

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
Sub. Keg. Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	- Jumlah Rapat Komisi	Kali								
	- Jumlah Perjalanan Dinas LD Banggar	Kali								
Sub. Keg. Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaba n Kepala Daerah	- Jumlah Rapat Komisi	Kali								
	- Jumlah Perjalanan Dinas LD Banggar	Kali								

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
Keg. Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	Kali								
Sub Keg. Orientasi DPRD	Frekuensi Orientasi DPRD awal masa jabatan	Kali								
Sub. Keg. Bimbingan Teknis DPRD	Frekuensi Bintek DPRD	Kali								
Sub Keg. Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Kegiatan Kehumasan DPRD	Kali								
Sub Keg. Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Kali								
Sub Keg. Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Kali								

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
Sub Keg. Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Perjalanan Dinas LD	Kali								
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah kegiatan Penyerapan dan Penghimpuna n Aspirasi Masyarakat	Jenis								
Sub Keg. Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah									
Sub Keg. Penyusunan Pokok- Pokok Pikiran DPRD	Jumah Rapat									
Sub Keg. Pelaksanaan Reses	Frekuensi Reses DPRD									

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab
			2020		2021	2022	2023	2024		
			Target	Realisasi	Target	Target	Target	Target		
Keg. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah kegiatan Badan Kehormatan									
Sub Keg. Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Rapat Badan Kehormatan									
	Jumlah Perjalanan Dinas LD									
Sub Keg. Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Rapat Badan Kehormatan									
	Jumlah Perjalanan Dinas LD									
Keg. Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD									
Sub Keg. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Perjalanan Dinas LD									

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Satuan	Capaian Tahun					Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Panggung jawab	
			2020		2021	2022	2023			2024
			Target	Realisasi	Target	Target	Target			Target
	Jumlah rapat DPRD									
Sub. Keg. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Perjalanan Dinas LD									
	Jumlah Rapat Badan Kehormatan									
Sub. Keg. Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Perjalanan Dinas LD									
	Jumlah Rapat paripurna dan gabungan pimpinan									

BAB VIII

PENUTUP

8.1 KAJIDAH PELAKSANAAN

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran secara operasional sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dari visi, misi, arah kebijakan, sasaran dan strategi sesuai dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 merupakan dasar/acuan untuk penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta menjadi pedoman bagi seluruh jajaran pimpinan dan staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

8.2 KAJIDAH PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang akan digunakan dalam rangka merealisasikan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 berasal dari Anggaran dan Pendapatan Belanja (APBD) Kabupaten Magelang.

Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang pelaksanaan strategis dan kebijakan pada prinsipnya untuk memperkuat Visi dan Misi Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2023, yang dalam pelaksanaannya memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut :

- a. Kesenambungan antara visi dan misi Perubahan RPJMD Pemerintah Kabupaten Magelang
- b. Keterikatan antara Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tujuan dan Sasaran Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang.
- c. Konsistensi Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang guna mendukung suksesnya Program Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang.

Selanjutnya keberhasilan peningkatan pelayanan pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Magelang secara terpadu diharapkan dapat mendukung tercapainya visi Bupati Magelang 2019 -2024 yaitu “Terwujudnya masyarakat kabupaten magelang yang sejahtera, berdaya saing dan amanah (*SEDAYA AMANAH*)

Kota Mungkid, 27 Oktober 2021

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG



Drs. ARI HANDOKO, MM

Pembina Tk I

NIP. 19730706199303 1 003

LAMPIRAN

POHON KINERJA

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAGELANG

Visi	Terwujudnya masyarakat kabupaten magelang yang sejahtera, berdaya saing dan amanah
------	--

Misi	3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah
------	--

TUJUAN :	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel
----------	---

Indikator Kinerja :	G Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
---------------------	------------------------------------

Sasaran :	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
-----------	---

Indikator Kinerja :	S NILAI AKIP
---------------------	--------------

Kepala Perangkat Daerah - Sekretaris DPRD

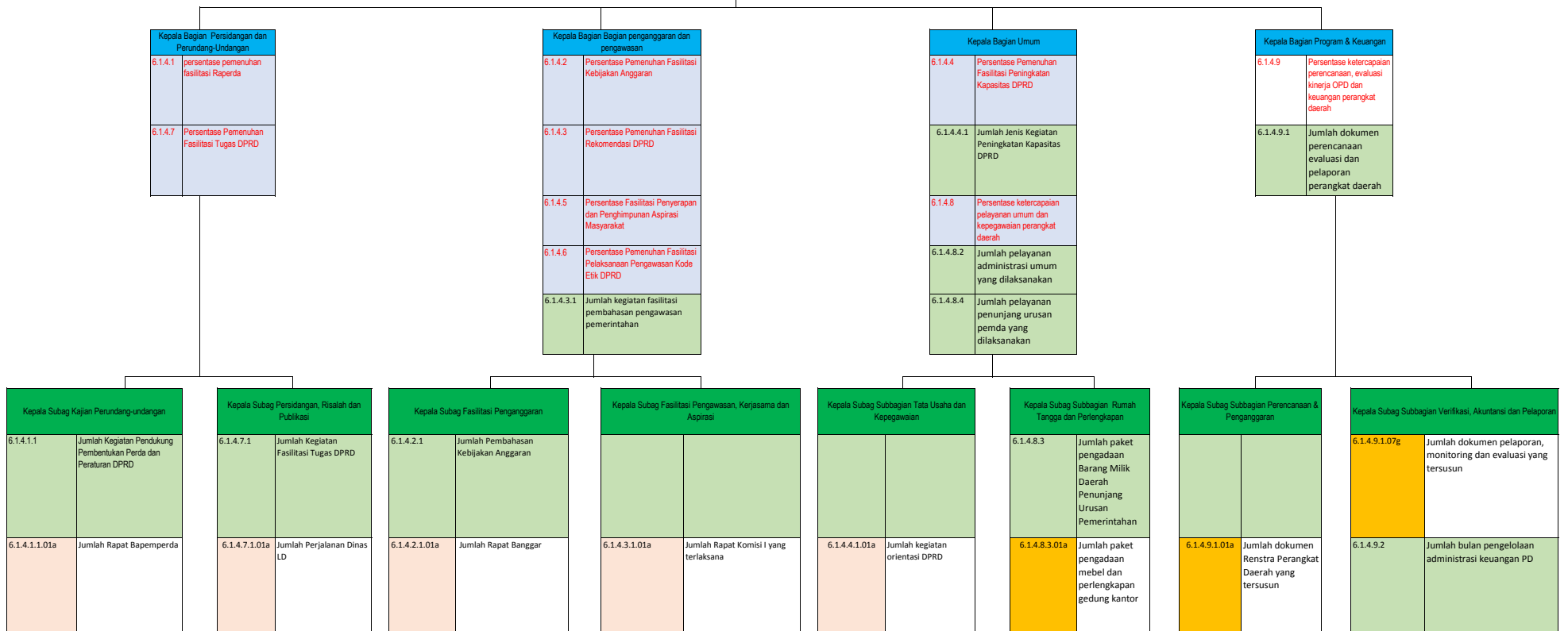
Sasaran PD :	Meningkatnya fasilitas layanan lembaga DPRD
--------------	---

Indikator Kinerja :	6.1.4 Persentase fasilitas layanan produk- produk hukum daerah.
---------------------	---

Sumber Data : Perubahan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2019-2024

Penetapan: Peraturan Bupati Nomor : tahun 2021 tentang Perubahan Renstra Kabupaten Magelang

Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten MAgelang



6.1.4.1.1.02a	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah
6.1.4.1.1.03b	Jumlah Rapat Rapat Pansus yang terlaksana
6.1.4.1.1.04b	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana
6.1.4.1.1.05c	Jumlah Kajian yang terlaksana
6.1.4.1.1.06c	Jumlah Rapat
6.1.4.1.1.07c	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah
6.1.4.1.1.08d	Jumlah Dokumen NA
6.1.4.1.1.09d	Jumlah Rapat Bapemperda
6.1.4.1.1.10d	Perjalanan Dinas Luar Daerah Bapemperda
6.1.4.1.1.11a	Jumlah Rapat Pembahasan Penyusunan Tata Tertib DPRD
6.1.4.1.1.12a	Jumlah Perjalanan Dinas LD

6.1.4.7.1.02a	Jumlah Rapat-rapat terkait koordinasi dan konsultasi
6.1.4.7.1.03b	Jumlah Rapat Badan Musyawarah
6.1.4.7.1.04b	Jumlah Perjalanan Dinas LD
6.1.4.7.1.05c	Jumlah Rapat-rapat terkait Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD
6.1.4.7.1.06c	Jumlah Perjalanan Dinas LD Pimpinan DPRD
6.1.4.4.1.03c	Jumlah Kegiatan Kehumasan DPRD

6.1.4.2.1.02a	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah
6.1.4.2.1.03a	Jumlah Rapat Luar Daerah
6.1.4.2.1.04b	Jumlah Rapat Rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
6.1.4.2.1.05b	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah
6.1.4.2.1.06b	Jumlah Rapat Luar Daerah
6.1.4.2.1.07c	Jumlah Rapat Rapat Pembahasan APBD
6.1.4.2.1.08c	Jumlah Perjalanan Dinas
6.1.4.2.1.09c	Jumlah Rapat Luar Daerah
6.1.4.2.1.10d	Jumlah Rapat-rapat
6.1.4.2.1.11d	Jumlah Perjalanan dinas luar daerah
6.1.4.2.1.12d	Jumlah Rapat Luar Daerah
6.1.4.2.1.13e	Jumlah Rapat Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
6.1.4.2.1.14e	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah
6.1.4.2.1.15e	Jumlah Rapat Luar Daerah
6.1.4.3.1.09e	Jumlah Rapat Rapat Membahas Pengawasan Tindak Lanjut Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan

6.1.4.3.1.02a	Jumlah perjalanan Dinas LD Komisi I
6.1.4.3.1.03b	Jumlah Rapat Komisi III yang terlaksana
6.1.4.3.1.04b	Jumlah Perjalanan Dinas LD Komisi III
6.1.4.3.1.05c	Jumlah Rapat Komisi IV yang terlaksana
6.1.4.3.1.06c	Jumlah Perjalanan Dinas LD Komisi IV
6.1.4.3.1.07d	Jumlah Rapat Komisi II yang terlaksana
6.1.4.3.1.08d	Jumlah Perjalanan Dinas LD Komisi II
6.1.4.5.1	Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat
6.1.4.5.1.01a	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD
6.1.4.5.1.02.b	Jumlah Rapat-rapat Fraksi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang terlaksana
6.1.4.5.1.03.c	Jumlah Perjalanan Dinas LD
6.1.4.5.1.04.d	Frekuensi Reses DPRD
6.1.4.6.1	Jumlah Kegiatan Kode Etik DPRD
6.1.4.6.1.01a	Jumlah Rapat-rapat Penyusunan Kode Etik DPRD
6.1.4.6.1.02a	Jumlah Perjalanan Dinas LD
6.1.4.6.1.03b	Jumlah Rapat Badan Kehormatan

6.1.4.4.1.02b	Frekuensi Bintek DPRD
6.1.4.4.1.04d	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli
6.1.4.4.1.05e	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi
6.1.4.4.1.06f	Jumlah Perjalanan Dinas LD Banmudy dan Gabungan Pimpinan
6.1.4.4.1.07f	Jumlah Rapat-rapat Banmudy dan Gabungan Pimpinan
6.1.4.8.1	Jumlah kegiatan kepegawaian yang dilaksanakan
6.1.4.8.1.01a	tersedianya Pakaian Dinas ASN
6.1.4.8.1.02b	Jumlah bintek yang diikuti oleh aparat
6.1.4.8.2.01b	Jumlah bahan pustaka yang dikelola
6.1.4.8.2.02c	Frekuensi Jamuan yang terlaksana
6.1.4.8.2.03d	Frekuensi Rapat Koordinasi yang terlaksana
6.1.4.8.2.04e	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang Terlaksana
6.1.4.8.2.05f	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana
6.1.4.8.2.06g	Jumlah arsip yang dikelola

6.1.4.8.3.01b	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor
6.1.4.8.3.01c	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor
6.1.4.8.4.02b	Jumlah Rekening air, listrik dan telepon dalam setahun
6.1.4.8.5	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah
6.1.4.8.5.01a	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara
6.1.4.8.5.02b	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara
6.1.4.8.5.03c	Jumlah Mebelair yang dipelihara
6.1.4.8.5.04d	Jumlah peralatan yang dipelihara
6.1.4.8.5.05e	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor dan Rumdin
6.1.4.8.5.06f	Jumlah Rumdin Ketua DPRD yang terpelihara

6.1.4.9.1.02b	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun
6.1.4.9.1.03c	Jumlah Dokumen RKA-RKAP/DPA-DPPA
6.1.4.9.1.04d	Jumlah Rakor Penyusunan Dok RKA PD
6.1.4.9.1.05e	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan DPA
6.1.4.9.1.06f	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA

6.1.4.9.2.01a	Tercukupinya Gaji dan Tunjangan ASN
6.1.4.9.2.02b	Jumlah Bulan yang Pengelolaan kegiatan Keuangan
6.1.4.9.2.03c	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Verifikasi Keuangan
6.1.4.9.2.04d	Jumlah Koordinasi Laporan Keuangan dan pemeriksaan BPK
6.1.4.9.2.05e	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi
6.1.4.9.2.06f	Frekuensi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir
6.1.4.9.2.07g	Frekuensi Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
6.1.4.9.2.08h	Jumlah Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD
6.1.4.9.2.09i	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran
6.1.4.9.3	Jumlah Layanan dan Kesejahteraan DPRD
6.1.4.9.3.01a	Terlaksananya Administrasi Keuangan DPRD
6.1.4.9.3.02b	Jumlah seragam dan atribut yang disediakan
6.1.4.9.3.03c	Jumlah Anggota DPRD yang diberikan jasa jaminan pemeliharaan Kesehatan

6.1.4.3.1.10e	Jumlah Perjalanan Dinas LD Badan Anggaran
6.1.4.3.1.11f	Jumlah Rapat Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
6.1.4.3.1.12f	Jumlah Perjalanan Dinas LD Badan Anggaran

6.1.4.6.1.04b	Jumlah Perjalanan Dinas LD Badan Kehormatan
---------------	---

6.1.4.8.4.01a	Jumlah surat yang dikelola
6.1.4.8.6	Jumlah Layanan Administrasi DPRD
6.1.4.8.6.01a	Jumlah Rapat Fraksi yang terlaksana
6.1.4.8.6.02b	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang Terlaksana
6.1.4.8.6.03c	Jumlah Rapat di Luar Kantor
6.1.4.8.6.04d	Tercukupinya Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD

Keterangan :

	Strategis/Forbiss
	Ex BAU
	Indikator Kegiatan
	Indikator Program

Lampiran 1

Tujuan Daerah		Sasaran Daerah		Sasaran PD		Program		Kegiatan		Sub Kegiatan			
Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode	Nama Indikator	Kode PD	KETERANGAN
6	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	6.1	Nilai AKIP	6.1.4	Persentase fasilitasi layanan produk- produk hukum daerah.	6.1.4.1	persentase pemenuhan fasilitasi Raperda	6.1.4.1.1	Jumlah Kegiatan Pendukung Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD	6.1.4.1.1.01a	Jumlah Rapat Bapemperda	22	6.1.4.1.1.01a.22
										6.1.4.1.1.02a	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	22	6.1.4.1.1.02a.22
										6.1.4.1.1.03b	Jumlah Rapat Rapat Pansus yang terlaksana	22	6.1.4.1.1.03b.22
										6.1.4.1.1.04b	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana	22	6.1.4.1.1.04b.22
										6.1.4.1.1.05c	Jumlah Kajian yang terlaksana	22	6.1.4.1.1.05c.22
										6.1.4.1.1.06c	Jumlah Rapat	22	6.1.4.1.1.06c.22
										6.1.4.1.1.07c	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	22	6.1.4.1.1.07c.22
										6.1.4.1.1.08d	Jumlah Dokumen NA	22	6.1.4.1.1.08d.22
										6.1.4.1.1.09d	Jumlah Rapat Bapemperda	22	6.1.4.1.1.09d.22
										6.1.4.1.1.10d	Perjalanan Dinas Luar Daerah Bapemperda	22	6.1.4.1.1.10d.22
										6.1.4.1.1.11a	Jumlah Rapat Pembahasan Penyusunan Tata Tertib DPRD	22	6.1.4.1.1.11a.22
										6.1.4.1.1.12a	Jumlah Perjalanan Dinas LD	22	6.1.4.1.1.12a.22
						6.1.4.2	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Kebijakan Anggaran	6.1.4.2.1	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	6.1.4.2.1.01a	Jumlah Rapat Banggar	22	6.1.4.2.1.01a.22
										6.1.4.2.1.02a	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	22	6.1.4.2.1.02a.22
										6.1.4.2.1.03a	Jumlah Rapat Luar Daerah	22	6.1.4.2.1.03a.22
										6.1.4.2.1.04b	Jumlah Rapat Rapat Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	22	6.1.4.2.1.04b.22
										6.1.4.2.1.05b	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	22	6.1.4.2.1.05b.22
										6.1.4.2.1.06b	Jumlah Rapat Luar Daerah	22	6.1.4.2.1.06b.22
										6.1.4.2.1.07c	Jumlah Rapat Rapat Pembahasan APBD	22	6.1.4.2.1.07c.22
										6.1.4.2.1.08c	Jumlah Perjalanan Dinas	22	6.1.4.2.1.08c.22
										6.1.4.2.1.09c	Jumlah Rapat Luar Daerah	22	6.1.4.2.1.09c.22
										6.1.4.2.1.10d	Jumlah Rapat-rapat	22	6.1.4.2.1.10d.22
										6.1.4.2.1.11d	Jumlah Perjalanan dinas luar daerah	22	6.1.4.2.1.11d.22
										6.1.4.2.1.12d	Jumlah Rapat Luar Daerah	22	6.1.4.2.1.12d.22
										6.1.4.2.1.13e	Jumlah Rapat Rapat Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	22	6.1.4.2.1.13e.22
										6.1.4.2.1.14e	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah	22	6.1.4.2.1.14e.22
										6.1.4.2.1.15e	Jumlah Rapat Luar Daerah	22	6.1.4.2.1.15e.22
						6.1.4.3	Persentase Pemenuhan Fasilitasi Rekomendasi DPRD	6.1.4.3.1	Jumlah kegiatan fasilitasi pembahasan pengawasan pemerintahan	6.1.4.3.1.01a	Jumlah Rapat Komisi I yang terlaksana	22	6.1.4.3.1.01a.22
										6.1.4.3.1.02a	Jumlah perjalanan Dinas LD Komisi I	22	6.1.4.3.1.02a.22
										6.1.4.3.1.03b	Jumlah Rapat Komisi III yang terlaksana	22	6.1.4.3.1.03b.22
										6.1.4.3.1.04b	Jumlah Perjalanan Dinas LD Komisi III	22	6.1.4.3.1.04b.22
										6.1.4.3.1.05c	Jumlah Rapat Komisi IV yang terlaksana	22	6.1.4.3.1.05c.22
										6.1.4.3.1.06c	Jumlah Perjalanan Dinas LD Komisi IV	22	6.1.4.3.1.06c.22
										6.1.4.3.1.07d	Jumlah Rapat Komisi II yang terlaksana	22	6.1.4.3.1.07d.22
										6.1.4.3.1.08d	Jumlah Perjalanan Dinas LD Komisi II	22	6.1.4.3.1.08d.22

				6.1.4.3.1.09e	Jumlah Rapat Rapat Membahas Pengawasan Tindak Lanjut Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	22	6.1.4.3.1.09e.22
				6.1.4.3.1.10e	Jumlah Perjalanan Dinas LD Badan Anggaran	22	6.1.4.3.1.10e.22
				6.1.4.3.1.11f	Jumlah Rapat Rapat Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	22	6.1.4.3.1.11f.22
				6.1.4.3.1.12f	Jumlah Perjalanan Dinas LD Badan Anggaran	22	6.1.4.3.1.12f.22
6.1.4.4	Persentase Pemenuhan Fasilitas Peningkatan Kapasitas DPRD	6.1.4.4.1	Jumlah Jenis Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD	6.1.4.4.1.01a	Jumlah kegiatan orientasi DPRD	22	6.1.4.4.1.01a.22
				6.1.4.4.1.02b	Frekuensi Bintek DPRD	22	6.1.4.4.1.02b.22
				6.1.4.4.1.03c	Jumlah Kegiatan Kehumasan DPRD	22	6.1.4.4.1.03c.22
				6.1.4.4.1.04d	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	22	6.1.4.4.1.04d.22
				6.1.4.4.1.05e	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	22	6.1.4.4.1.05e.22
				6.1.4.4.1.06f	Jumlah Perjalanan Dinas LD Banmudy dan Gabungan Pimpinan	22	6.1.4.4.1.06f.22
				6.1.4.4.1.07f	Jumlah Rapat-rapat Banmudy dan Gabungan Pimpinan	22	6.1.4.4.1.07f.22
6.1.4.5	Persentase Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	6.1.4.5.1	Jumlah Kegiatan Penyerapan Aspirasi Masyarakat	6.1.4.5.1.01.a	Jumlah Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD	22	6.1.4.5.1.01.22
				6.1.4.5.1.02.b	Jumlah Rapat-rapat Fraksi penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD yang terlaksana	22	6.1.4.5.1.02.22
				6.1.4.5.1.03.c	Jumlah Perjalanan Dinas LD	22	6.1.4.5.1.03.22
				6.1.4.5.1.04.d	Frekuensi Reses DPRD	22	6.1.4.5.1.04.22
6.1.4.6	Persentase Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Pengawasan Kode Etik DPRD	6.1.4.6.1	Jumlah Kegiatan Kode Etik DPRD	6.1.4.6.1.01a	Jumlah Rapat-rapat Penyusunan Kode Etik DPRD	22	6.1.4.6.1.01a.22
				6.1.4.6.1.02a	Jumlah Perjalanan Dinas LD	22	6.1.4.6.1.02a.22
				6.1.4.6.1.03b	Jumlah Rapat Badan Kehormatan	22	6.1.4.6.1.03b.22
				6.1.4.6.1.04b	Jumlah Perjalanan Dinas LD Badan Kehormatan	22	6.1.4.6.1.04b.22
6.1.4.7	Persentase Pemenuhan Fasilitas Tugas DPRD	6.1.4.7.1	Jumlah Kegiatan Fasilitas Tugas DPRD	6.1.4.7.1.01a	Jumlah Perjalanan Dinas LD	22	6.1.4.7.1.01a.22
				6.1.4.7.1.02a	Jumlah Rapat-rapat terkait koordinasi dan konsultasi	22	6.1.4.7.1.02a.22
				6.1.4.7.1.03b	Jumlah Rapat Badan Musyawarah	22	6.1.4.7.1.03b.22
				6.1.4.7.1.04b	Jumlah Perjalanan Dinas LD	22	6.1.4.7.1.04b.22
				6.1.4.7.1.05c	Jumlah Rapat-rapat terkait Fasilitas Tugas Pimpinan DPRD	22	6.1.4.7.1.05c.22
				6.1.4.7.1.06c	Jumlah Perjalanan Dinas LD Pimpinan DPRD	22	6.1.4.7.1.06c.22
6.1.4.8	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah	6.1.4.8.1	Jumlah kegiatan kepegawaian yang dilaksanakan	6.1.4.8.1.01a	tersedianya Pakaian Dinas ASN	22	6.1.4.8.1.01a.22
				6.1.4.8.1.02b	Jumlah bintek yang diikuti oleh aparatur	22	6.1.4.8.1.02b.22
		6.1.4.8.2	Jumlah pelayanan administrasi umum yang dilaksanakan	6.1.4.8.2.01a	Jumlah Plaket yang dibeli	22	6.1.4.8.2.01a.22

				6.1.4.8.2.02b	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	22	6.1.4.8.2.02b.22
				6.1.4.8.2.03c	Frekuensi Jamuan yang terlaksana	22	6.1.4.8.2.03c.22
				6.1.4.8.2.04d	Frekuensi Rapat Koordinasi yang terlaksana	22	6.1.4.8.2.04d.22
				6.1.4.8.2.05e	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang Terlaksana	22	6.1.4.8.2.05e.22
				6.1.4.8.2.06f	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang terlaksana	22	6.1.4.8.2.06f.22
				6.1.4.8.2.07g	Jumlah arsip yang dikelola	22	6.1.4.8.2.07g.22
		6.1.4.8.3	Jumlah paket pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	6.1.4.8.3.01a	Jumlah paket pengadaan mebel dan perlengkapan gedung kantor	22	6.1.4.8.3.01a.22
				6.1.4.8.3.02b	Jumlah paket pengadaan peralatan gedung kantor	22	6.1.4.8.3.02b.22
				6.1.4.8.3.03c	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor	22	6.1.4.8.3.03c.22
		6.1.4.8.4	Jumlah pelayanan penunjang urusan pemda yang dilaksanakan	6.1.4.8.4.01a	Jumlah surat yang dikelola	22	6.1.4.8.4.01a.22
				6.1.4.8.4.02b	Jumlah Rekening air, listrik dan telepon dalam setahun	22	6.1.4.8.4.02b.22
		6.1.4.8.5	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah	6.1.4.8.5.01a	Jumlah kendaraan dinas Jabatan yang dipelihara	22	6.1.4.8.5.01a.22
				6.1.4.8.5.02b	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	22	6.1.4.8.5.02b.22
				6.1.4.8.5.03c	Jumlah Mebelair yang dipelihara	22	6.1.4.8.5.03c.22
				6.1.4.8.5.04d	Jumlah peralatan yang dipelihara	22	6.1.4.8.5.04d.22
				6.1.4.8.5.05e	Jumlah paket rehabilitasi sedang/berat Gedung Kantor dan Rumdin	22	6.1.4.8.5.05e.22
				6.1.4.8.5.06f	Jumlah Rumdin Ketua DPRD yang terpelihara	22	6.1.4.8.5.06f.22
		6.1.4.8.6	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	6.1.4.8.6.01a	Jumlah Rapat Fraksi yang terlaksana	22	6.1.4.8.6.01a.22
				6.1.4.8.6.02b	Jumlah Perjalanan Dinas Luar Daerah yang Terlaksana	22	6.1.4.8.6.02b.22
				6.1.4.8.6.03c	Jumlah Rapat di Luar Kantor	22	6.1.4.8.6.03c.22
				6.1.4.8.6.04d	Tercukupinya Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD	22	6.1.4.8.6.04d.22
6.1.4.9	Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah	6.1.4.9.1	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	6.1.4.9.1.01a	Jumlah dokumen Renstra Perangkat Daerah yang tersusun	22	6.1.4.9.1.01a.22
				6.1.4.9.1.02b	Jumlah dokumen Renja Perangkat Daerah yang tersusun	22	6.1.4.9.1.02b.22
				6.1.4.9.1.03c	Jumlah Dokumen RKA-RKAP/DPA-DPPA	22	6.1.4.9.1.03c.22
				6.1.4.9.1.04d	Jumlah Rakor Penyusunan Dok RKA PD	22	6.1.4.9.1.04d.22

				6.1.4.9.1.05e	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan DPA	22	6.1.4.9.1.05e.22
				6.1.4.9.1.06f	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA	22	6.1.4.9.1.06f.22
				6.1.4.9.1.07g	Jumlah dokumen pelaporan, monitoring dan evaluasi yang tersusun	22	6.1.4.9.1.07g.22
		6.1.4.9.2	Jumlah bulan pengelolaan administrasi keuangan PD	6.1.4.9.2.01a	Tercukupinya Gaji dan Tunjangan ASN	22	6.1.4.9.2.01a.22
				6.1.4.9.2.02b	Jumlah Bulan yang Pengelolaan kegiatan Keuangan	22	6.1.4.9.2.02b.22
				6.1.4.9.2.03c	Jumlah Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Verifikasi Keuangan	22	6.1.4.9.2.03c.22
				6.1.4.9.2.04d	Jumlah Koordinasi Laporan Keuangan dan pemeriksaan BPK	22	6.1.4.9.2.04d.22
				6.1.4.9.2.05e	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi	22	6.1.4.9.2.05e.22
				6.1.4.9.2.06f	Frekuensi Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir	22	6.1.4.9.2.06f.22
				6.1.4.9.2.07g	Frekuensi Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	22	6.1.4.9.2.07g.22
				6.1.4.9.2.08h	Jumlah Rekonsiliasi Laporan Keuangan SKPD	22	6.1.4.9.2.08h.22
				6.1.4.9.2.09i	Jumlah Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	22	6.1.4.9.2.09i.22
		6.1.4.9.3	Jumlah Layanan dan Kesejahteraan DPRD	6.1.4.9.3.01a	Terlaksananya Administrasi Keuangan DPRD	22	6.1.4.9.3.01a.22
				6.1.4.9.3.02b	Jumlah seragam dan atribut yang disediakan	22	6.1.4.9.3.02b.22
				6.1.4.9.3.03c	Jumlah Anggota DPRD yang diberikan jasa jaminan pemeliharaan Kesehatan	22	6.1.4.9.3.03c.22

BERITA ACARA
HASI KESEPAKATAN FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
PENYUSUNAN PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 - 2024

Nomor : 900 / 361 / 02 / 2021

Pada hari Kamis tanggal 27 bulan Mei tahun 2021 telah menyelenggarakan forum Perangkat Daerah Perangkat Daerah Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang yang dihadiri oleh para pemangku kepentingan sebagaimana daftar hadir peserta yang tercantum dalam LAMPIRAN I berita acara ini.

Setelah meperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi Forum PD yang disampaikan Sekretaris DPRD, Drs. ARI Handoko, MM
2. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang terhadap materi yang dipaparkan oleh masing-masing ketua kelompok diskusi, maka pada :

Hari dan Tanggal : Kamis, 27 Mei 2021
Jam : 11.00 WIB
Tempat : Ruang Komisi 1 DPRD KAB.MAGELANG

Forum Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang

MENYEPAKATI

- KESATU : Isu strategis (pelayanan) perangkat daerah, tujuan, dan sasaran, strategi dan kebijakan pelayanan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN II berta acara ini;
- KEDUA : Rencana program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 yang disertai dengan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN III berita acara ini.
- KETIGA : Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN IV berita acara ini;
- KEEMPAT: Berita acara beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

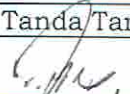


Tanggal 27 Mei 2021
SEKRETARIS DPRD
Selaku Pimpinan Sidang Forum
Perangkat Daerah Sekretariat DPRD



Drs. ARI HANDOKO, MM
NIP. 19730525 199203 1 003

Menyetujui

Wakil Peserta Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang




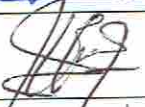
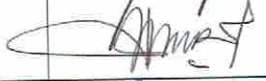








NO	Nama	Lembaga/Instansi	Jabatan/Alamat	Tanda/Tangan
1.	Drs. SOEHARNO, MM	DPRD	Mertoyudan	
2.	ASWANDI, S.Si, MT	Unsur Bappeda	Danurejo, Mertoyudan	
3.	Drs. ARI HANDOKO, MM	Unsur SKPD	Magelang	

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN FORUM
PERANGKAT DAERAH/LINTAS
PERANGKAT DAEAH

NOMOR :
TANGGAL :

**DAFTAR HADIR PESERTA FORUM PERANGKAT DAERAH/LINTAS PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN MAGELANG**

Hari : Kamis
Tanggal : 27 Mei 2021
Pukul : 10.30
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Magelang

No	Nama	Lembaga/Instansi	Alamat & no. telp	Tanda tangan
1	Arwanto	Bappeda Litbang		
2	AMIRUDIN ZUHRI	BAPPEDALITBANG		
3	ARI HANDOU	SETWAN		
4	ARI KUSWARDANI	Set - DPRD		
5	Sri Laili S	Setwan		
6	ISKIYATI	Setwan		
7	KASTOLANI	SETWAN		
8	SRI SUMATHI	SETWAN		
9	Indira	Setwan		
10	Ira Fitriyati	Setwan		
11	ITA PUSPITA	Set DPRD		
12	Sri Kusri Dyan Efu	Setwan		
13	Mamik Subelo	Setwan		
14	Mustofa	Setwan		
15				
16				
17				
18				
19				

20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				

Kota Mungkid, 27 Mei 2021

Pimpinan Sidang

SEKRETARIS DPRD

KABUPATEN MAGELANG

Kepala Bagian Keuangan



Drs. ARI HANDOKO, MM

NIP. 19730625 199203 1 003